

No	Tanggal	Keterangan
1	28 Januari 2023	Penulis korespondensi mengirimkan naskah publikasi ke redaksi.
2	9 Agustus 2023	Redaksi memberikan hasil review yaitu Diterima dengan Revisi.
	31 Agustus 2023	Penulis mengirimkan naskah yang sudah direvisi.
	20 September 2023	Redaksi mengirimkan Letter of Acceptance.
	21 September 2023	Penulis menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya publikasi.
3	1 Oktober 2023	Naskah dinyatakan diterima di sistem OJS.
4	1 Oktober 2023	Naskah terbit pada Volume 14 Nomor 3 Tahun 2023.

Home > User > Author > Submissions > #14569 > **Summary**

#14569 Summary

SUMMARY REVIEW EDITING

Submission

Authors	Prabu Mandvi Hafiz Anjar Suhendar, Yosafat Aji Pranata
Title	Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Ekstrim oleh Peserta MSIB Kampus Merdeka Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
Original file	14569-45110-1-SM.DOCX 2023-01-28
Supp. files	None
Submitter	Dr. Yosafat Aji Pranata
Date submitted	January 28, 2023 - 04:16 AM
Section	Articles
Editor	Nur Cholifah
Abstract Views	319

- [Editorial Team](#)
- [Reviewers](#)
- [Peer Review Process](#)
- [Publication Frequency](#)
- [Focus & Scope](#)
- [Publication Ethics](#)
- [Copyright Transfer Form](#)
- [Author Guidelines](#)
- [Journal Publishing Fee](#)
- [Section Policies](#)
- [Open Access Policy](#)

←

6 of 39

[E-Dimas] Editor Decision Inbox x



Sutrisno Sutrisno <ojs@upgris.ac.id>
to me ▾

Wed, Aug 9, 2023, 6:17 PM

[Translate to English](#) x

Dr. Yosafat Aji Pranata:

We have reached a decision regarding your submission to E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, "PERAN PESERTA MSIB KAMPUS MERDEKA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS RUMAH SEBAGAI UPAYA MENANGANI KEMISKINAN EKSTREM DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR".

Our decision is to: Revisions Required

Sutrisno Sutrisno
Universitas PGRI Semarang
Phone 085640677567
sutrisnoj@upgris.ac.id

E-DIMAS, LPPM Universitas PGRI Semarang
<http://journal.upgris.ac.id/index.php/e-dimas>

#14569 Review

SUMMARY REVIEW EDITING

Submission

Authors	Prabu Mandvi Hafiz Anjar Suhendar, Yosafat Aji Pranata
Title	Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Ekstrem oleh Peserta MSIB Kampus Merdeka Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
Section	Articles
Editor	Nur Cholifah

Peer Review

Round 1

Review Version	14569-45111-1-RV.DOCX 2023-01-28
Initiated	2023-01-30
Last modified	2023-08-09
Uploaded file	Reviewer A 14569-45258-1-RV.DOCX 2023-02-02

Editor Decision

Decision	Accept Submission 2023-09-21
Notify Editor	Editor/Author Email Record 2023-08-31
Editor Version	None
Author Version	14569-53011-1-ED.DOCX 2023-08-31 DELETE
Upload Author Version	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Upload"/>

< 📄 ⓘ 🗑️ 📧 📎 ⋮

5 of 39

PERAN PESERTA MSIB KAMPUS MERDEKA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS RUMAH SEBAGAI UPAYA MENANGANI KEMISKINAN EKSTREM DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR Inbox x



Dr. Yosafat Aji Pranata <ojs@upgris.ac.id>
to ifahpgrismg

Thu, Aug 31, 2023, 3:21PM ☆ 😊

x

Kepada yth. Redaksi Jurnal EDIMAS
di tempat

Dengan hormat,
Bersama email ini saya sampaikan revisi sesuai arahan dan masukan dari reviewer.

Terima kasih.

Salam hormat,
Penulis.

E-DIMAS, LPPM Universitas PGRI Semarang
<http://journal.upgris.ac.id/index.php/e-dimas>

One attachment • Scanned by Gmail ⓘ



Penerimaan Artikel pada Jurnal E-DIMAS UPGRIS UPGRIS Inbox x



E-Dimas UPGRIS <edimasupgris@gmail.com>
to me ▾

Wed, Sep 20, 2023, 9:26 AM ☆ 😊 ↶ ⋮

Translate to English ✕

Yth. Penulis Artikel Jurnal E-Dimas

Penulis: Yosafat Aji Pranata

Judul Artikel: PERAN PESERTA MSIB KAMPUS MERDEKA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS RUMAH SEBAGAI UPAYA MENANGANI KEMISKINAN EKSTREM DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR

Berikut kami lampirkan surat penerimaan artikel untuk dipublikasikan pada Jurnal E-DIMAS pada Vol. 14 No. 3 September 2023. Kami tunggu konfirmasinya melalui email atau No Hp. 085640677567, terimakasih.

Editor Jurnal E-DIMAS
Universitas PGRI Semarang

One attachment • Scanned by Gmail 🗑



yosafat ap <yosafat.ap@gmail.com>
to E-Dimas ▾

Thu, Sep 21, 2023, 8:52 AM ☆ 😊

Kepada yth. Redaksi Jurnal E-Dimas
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama email ini saya sampaikan bukti pembayaran biaya penerbitan artikel saya, dgn rincian:

- Rp. 400.000,00 untuk Penerbitan Artikel
- Rp. 200.000,00 untuk Pembelian 2 Hardcopy
- Total Rp. 600.000,00

Terima kasih atas kesempatan dimuatnya artikel saya.

Salam hormat,
Yosafat A.P.

> On 20 Sep 2023, at 10.26, E-Dimas **UPGRIS** <edimasupgris@gmail.com> wrote:

>

>

> <pembayaran edimas september 2023.pdf>

One attachment • Scanned by Gmail 🗑



m-Transfer:
BERHASIL
21/09/2023 08:48:38

Ke Rekening Tujuan
JATENG
2021228276
JURNAL E DIMAS

NOMINAL TRANSFER Rp 600,000.00
BIAYA Rp 2,500.00
LAYANAN BI FAST
BERITA Edimas Yosafat
TUJUAN TRANSAKSI Lainnya
Ref 20230921CENAIJJA51084746947
No Urut 418081

Biaya Termasuk PPN (Bila ada)
PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
MENARA BCA - JAKARTA PUSAT
NPWP : 01.308.449.6-091.000

Back



E-Dimas UPGRIS <edimasupgris@gmail.com>
to me

Thu, Sep 21, 2023, 9:05 AM ☆ 😊

Translate to English X

Terimakasih akan kami proses, mohon kirimkan alamat pengiriman untuk jurnal cetaknya.

...



yosafat ap <yosafat.ap@gmail.com>
to E-Dimas

Thu, Sep 21, 2023, 2:20 PM ☆ 😊

Yth, Redaksi E-Dimas
Di tempat

Dengan hormat,
Alamat pengiriman:
Dr. Yosafat Aji Pranata
Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha
Jalan Suria Sumantri 65, Bandung 40164

Terima kasih.

Salam hormat,
Yosafat AP.



E-Dimas UPGRIS <edimasupgris@gmail.com>
to me

Oct 1, 2023, 8:57 PM ☆ 😊

Translate to English X

Selamat malam, memberitahukan bahwa artikel bapak/ibu telah terbit pada E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 14 No. 3, September 2023 yang dapat diakses melalui <https://journal.upgris.ac.id/index.php/e-dimas/issue/view/814>. Terimakasih atas kontribusi artikelnya dan kami tunggu artikel Bapak/Ibu selanjutnya.

...

← Reply

→ Forward



PERAN PESERTA MSIB KAMPUS MERDEKA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS RUMAH SEBAGAI UPAYA MENANGANI KEMISKINAN EKSTREM DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR

Prabu Mandvi Hafiz Anjar Suhendar¹, Yosafat Aji Pranata^{2*}

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia^{1,2}

* Penulis Korespondensi : yosafat.ap@gmail.com

Abstract

One of the primary human needs is to build and own a house. According to Siswono Yudohusodo (Rumah Untuk Seluruh Rakyat, 1991:432), a house serves as a living space and a location to raise a family. Therefore, without a house, humans will suffer to do things and survive. A home needs to fulfill the livable criteria so the resident can feel safe and comfortable while living inside their house. However, not all houses fulfill the livable criteria, one of the major factors is extreme poverty. In Indonesia, extreme poverty can be caused by many factors, one of them is low income. Extreme poverty can have a major impact on the condition of houses. One of the poorest provinces in Indonesia is East Nusa Tenggara, with a percentage of poverty in cities and villages at 20.50%, this number was obtained by the Indonesia Central Bureau of Statistics in March 2022. This article aims to deliver the contribution of Maranatha Christian University students who became an intern at MSIB Kampus Merdeka Batch 3 at the Directorate General of Human Settlement, Ministry of Public Works and Housing (PUPR) with the Self-Help Housing Stimulant Program (BSPS) in Kupang City, East Nusa Tenggara.

Keywords: *Extreme Poverty, Kupang City, Livable Criteria, Self-Help Housing Stimulant Program (BSPS)*

Abstrak

Kebutuhan primer manusia salah satunya adalah membangun dan memiliki tempat tinggal. Menurut Siswono Yudohusodo (Rumah Untuk Seluruh Rakyat, 1991: 432), rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sebuah sarana pembinaan keluarga. Sehingga tanpa adanya tempat tinggal manusia akan mengalami kesulitan melakukan kegiatan dan bertahan hidup. Sebuah tempat tinggal juga harus memenuhi kriteria layak huni agar penghuni dapat merasa aman dan nyaman saat didalam rumah tersebut. Namun faktanya tidak semua rumah masuk kedalam kategori layak huni, salah satu faktor utamanya diakibatkan oleh kemiskinan ekstrem. Di Indonesia, kemiskinan ekstrem mampu diakibatkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah. Kemiskinan ekstrem ini juga dapat berpengaruh besar terhadap kondisi tempat tinggal. Salah satu provinsi termiskin di Indonesia adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase kemiskinan perkotaan dan perdesaan dengan jumlah sebesar 20.50%. hasil ini diperoleh oleh Badan

Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2022. Artikel ini memiliki tujuan untuk menyampaikan hasil kontribusi dari mahasiswa Universitas Kristen Maranatha yang menjadi seorang peserta magang di MSIB Kampus Merdeka Angkatan 3 pada Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam mengatasi kemiskinan ekstrem bidang perumahan masyarakat dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Kata kunci: *Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kemiskinan Ektrem, Kota Kupang, Magang & Studi Independen Bersertifikat (MSIB).*

A. PENDAHULUAN

Menjadi seorang mahasiswa merupakan tanggung jawab yang besar dan harus menjadi pribadi yang aktif dan mandiri dalam kegiatan di dalam kampus maupun diluar kampus. Kegiatan yang dilakukan tentunya merupakan kegiatan positif yang dapat mendukung meningkatkan kemampuan, baik itu *hardskills* ataupun *softskills* mahasiswa. Tentunya dalam hal ini peran instansi baik dari pihak sekolah maupun kampus dan sebagainya, perlu mendukung secara penuh dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki para pelajarnya untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Universitas Kristen Maranatha juga turut mengambil peran dalam membantu mengembangkan kemampuan akademik maupun non-akademik agar

mendukung negara ini menjadi negara maju.

Salah satu langkah yang didukung adalah mempersiapkan mahasiswa dan mahasiswi untuk mengikuti program Magang & Studi Independen Bersertifikat (MSIB), Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu gagasan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Program ini memiliki kebijakan dan keuntungan yang berbeda dari program magang dari biasanya. Program ini juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa dan mahasiswi agar dapat melaksanakan kegiatan diluar program studi dan mendapatkan pengalaman untuk mempraktikan ilmu yang didapat kedalam lingkungan yang nyata, selain itu program ini juga mendukung mahasiswa dan mahasiswi

dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan seperti bantuan Bantuan Biaya Hidup (BBH), fasilitas biaya perjalanan dari tempat tinggal ke lokasi magang, dan juga Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Program ini juga membantu mahasiswa dan mahasiswi di Indonesia untuk dapat meningkatkan kompetensi mereka. Kompetensi perlu dipersiapkan untuk menghadapi perubahan sosial, budaya, kemajuan teknologi, dan juga kehidupan di dunia kerja. Tujuan program ini juga bisa dijadikan sebuah alternatif pengganti dari mata kuliah Magang atau Kerja Praktek (KP) atau juga sebagai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Sehingga diharapkan dengan adanya program ini mahasiswa dan mahasiswa mendapatkan kesempatan bekerja bersama mitra-mitra terkait. Salah satu mitra yang menyediakan lowongan program magang dalam MSIB Angkatan 3 pada Tahun 2022 adalah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Kementerian Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam pembangunan di bidang konstruksi. Kementerian PUPR memfokuskan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tertera pada Peraturan Presiden Pasal 4 Nomor 27 Tahun 2020.

Kegiatan magang yang mulai dilaksanakan pada 18 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2022 atau kurang lebih 5 bulan jika terhitung pendaftaran ini meerangkul banyak pekerjaan, Adapun posisi yang diberikan adalah adalah Pendamping Fasilitator Teknik kegiatan BSPS dan Pendamping Fasilitator Pemberdayaan Kegiatan BSPS. Adapun kegiatan dan tujuan yang dilaksanakan dalam kegiatan adalah: (a) Membantu melakukan pengawasan pembangunan penerima bantuan, (b) Membantu mengambil dokumentasi di lapangan, (c) Membantu mengambil data yang dibutuhkan di lapangan (d) Menjadi pekerja bangunan atau kuli

bangunan dalam pembangunan rumah, (e) Membantu mengurus bagian administrasi penerima bantuan, (f) Membantu mengisi formulir *Quality Assesment & Quality Control*, (f) Membantu melengkapi gambar teknik rumah penerima bantuan, (g) Membantu melengkapi gambar teknik rumah penerima bantuan, (h) Membantu melengkapi gambar teknik rumah penerima bantuan, (i) Membantu melengkapi data pada BNBA, (j) Membantu melengkapi laman web *www.sirus.perumahan.pu.go.id*, (k) Membantu pemeriksaan Laporan Individu dan Laporan Kelompok Penerima Bantuan BSPS, (l) Membantu menjadi panitia dalam Acara Rapat Koodinasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebagai asisten dari Tenaga Fasilitator Lapangan tentunya tugas yang didapat juga tidak jauh berbeda, namun salah satu tugas utama dan paling penting adalah melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang berlangsung selama periode yang ada. Sebagai mahasiswa magang tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah. Berperan dalam membantu menjalankan sebuah

program dari pemerintah dengan tujuan yang mulia, yaitu mengatasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) bukanlah sebuah hal yang mudah, pasalnya dalam pelaksanaannya, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi. Terutama saat menghadapi masyarakat dengan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, serta memiliki perbedaan latar belakang dan bahasa. Kendala-kendala tersebut juga dapat dirasakan oleh peserta Magang dalam Program MSIB Angkatan 3 yang lain.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang memiliki pulau lebih banyak dari provinsi lain, terdapat **1.192** pulau dalam provinsi ini. Tentunya dari sekian banyak pulau tersebut, pemerintah terus berupaya melakukan perhitungan yang matang serta pembangunan yang merata agar dapat memenuhi masyarakat di provinsi ini. Salah satu fokus pemerintah dalam pembangunan adalah pembangunan rumah tinggal. Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia Periode 2019-2024

menyampaikan sebuah instruksi bahwa Kementerian PUPR perlu mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, salah satunya dengan melalui perbaikan rumah. Sehingga, sejak 2021 hingga 2024 mendatang, pemerintah berupaya mencapai target, yaitu mengatasi kemiskina ekstrem di **514** Kabupaten dan Kota agar persentase kemiskinan ekstrem mencapai dibawah **1%**. Hasil dari instruksi tersebut, melalui Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, memilih untuk memfokuskan beberapa aspek melalui programnya, diantaranya adalah percepatan penurunan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan kualitas RTLH, penanganan stunting dan penderita TBC, dan penanganan kawasan perumahan dan pemukiman kumuh terintegrasi.

Mengatasi kemiskinan ekstrem tentunya bukanlah hal yang mudah, Menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa atau KBBI, kata “miskin” memiliki arti sebagai tidak berharta dan serba kekurangan. Lalu kata “ekstrem” adalah yang paling ujung, yang paling tinggi dan yang paling

keras. Definisi yang berasal dari KBBI mengenai kata “miskin” dan “ekstrem” memiliki makna bahwa masyarakat miskin ekstrem merupakan golongan masyarakat yang paling tidak berharta dan yang paling serba kekurangan dalam bentuk harta. Kata miskin juga memiliki arti bahwa miskin adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 1997). Sementara itu menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations* (UN) pada tahun 1996 menjelaskan bahwa Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (*United Nations*, 1996). Tingkat kemiskinan ekstrem dapat diukur menggunakan “*absolute poverty measure*” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Kemiskina ekstrem didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki pengasihian di bawah **US\$1.9 PPP** (*Purchasing*

Power Parity)/paritas daya beli, atau setara dengan **Rp29.378** (30 Desember 2022). Lingkungan yang tidak sehat tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan manusia, terutama seorang anak. Masa balita merupakan sebuah periode yang sangat peka terhadap lingkungan sehingga diperlukan perhatian lebih terutama kecukupan gizinya. Salah satu yang menjadi prioritas pemberantasan oleh pemerintah adalah kondisi stunting, Dikutip dari laman web Kementerian Kesehatan, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Diharapkan dengan adanya perbaikan lingkungan hidup, akan memperbaiki kesehatan dari penghuninya terutama generasi penerus bangsa.

Kota Kupang memiliki luas wilayah sebesar **180.3Km²** atau sekitar 18.030 hektar. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di Kota Kupang (2020), kota ini memiliki **442.758.000** jiwa penduduk,

dengan tingkat persentase kemiskinan sebesar **8.61%** per tahun 2022. Tentunya angka 8.61% bukanlah angka yang baik, ditambah lagi dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) provinsi ini berjumlah **Rp 1.950.00** yang sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan UMP Kota Jakarta sebesar **Rp 4.641.854**. Hal ini masih menjadi target pemerintah Kota Kupang untuk menangani kemiskinan ekstrem, ditambah lagi dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki tingkan kemiskinan provinsi ini sebanyak **20.05%** dari **1.131.620** penduduk.

Tentunya hal-hal tersebut terkoneksi dan saling berhubungan, perlu adanya sebuah program dari pemerintah yang mampu membantu mengurangi masalah tersebut. Maka dari itu salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia, pemerintah memberikan program-program yang inovatif dan terintergasi, salah satunya adalah Program BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program yang digarap oleh

pemerintah, di instruksikan oleh presiden dan dijalankan oleh Kementerian PUPR. Dalam BSPS terdapat kata “stimulan” dan “swadaya” yang kurang umum bagi pandangan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, stimulan adalah sesuatu yang menjadi cambuk bagi peningkatan prestasi atau semangat bekerja, atau pendorong dan perangsang. Untuk kata “swadaya” sendiri memiliki arti bahwa swadaya adalah kekuatan tenaga sendiri. Sehingga arti dalam garis Bahasa yang ada bahwa program ini merupakan sebuah pendorong bagi masyarakat untuk dapat mengerjakan pembangunan rumah mereka dengan tenaga sendiri, uang sendiri, atau bantuan orang lain. Penyelenggaraan program ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak dasar rakyat di Indonesia untuk bertempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat.

Pemerintah membentuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan atau disingkat BP2P yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun

2020. BP2P merupakan Unit Pelaksana Teknis Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan khususnya Direktorat Rumah Swadaya yang termasuk BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. BSPS memiliki sebuah tujuan yang terfokus dalam beberapa aspek, aspek-aspek ini merupakan sebuah poin penting yang perlu dituju dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, menjalankan instruksi Presiden, dan memenuhi tujuan-tujuan dalam pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yang di tentukan oleh *United Nations*. Dari ke tujuh belas tujuan, program ini terlihat berfokus menangani 3 tujuan, yaitu: (a) Tujuan 1, *No Poverty* atau Tanpa Kemiskinan, (b) Tujuan 2, *Good Health and Well Being* atau Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (c) *Clean Water and Sanitation* atau Air Bersih dan Sanitasi Layak.

Sebuah program tentunya memiliki dasar hukum agar memperlancar segala urusan dan tujuannya, Berdasarkan Petunjuk Teknis, Surat Edaran Nomor 3/SE/Dr/2021 Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, dengan judul Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BPS sendiri memiliki 8 dasar hukum, salah satunya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403).

Dari dasar-dasar hukum tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah dana untuk kebutuhan program ini, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dana yang diberikan oleh pemerintah untuk satu penerima bantuan adalah sebesar Rp20.000.000, dengan rincian, Rp 17.500.000 untuk material dan biaya lainnya dan Rp 2.500.000 untuk upah tukang. Dana tersebut digunakan sebagai stimulan untuk warga dalam membangun dan memperbaiki kondisi rumah. Dana tersebut berasal dari APBN atau (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dana bantuan ini disalurkan tidak dengan uang tunai atau *cash* langsung kepada penerima

bantuan, tetapi uang tersebut di simpan di pihak bank atau pos penyalur yang nantinya dibelanjakan material sesuai pengawasan dan pengarahan Tenaga Fasilitator Lapangan. Tujuannya agar dana bantuan tidak disalahgunakan. Nantinya penggunaan dana tersebut juga akan dilaporkan melalui Laporan Penggunaan Dana atau LPD secara bertahap (LPD 1 & LPD 2).

B. METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah melaksanakan beberapa tahapan sesuai pada Petunjuk Teknis, Surat Edaran Nomor 3/SE/Dr/2021 Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan judul Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yaitu:

a. Persiapan Kegiatan

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pengusulan lokasi, lalu melakukan verifikasi/penilaian usulan, penetapan lokasi,

seleksi/pengolahan data, dan penyampaian daftar calon penerima bantuan.

b. Perencanaan Kegiatan

Kegiatan kedua adalah melakukan pembentukan tim pelaksana, seleksi bank/pos penyalur, pembekalan dan mobilisasi tim pelaksana, seleksi dan verifikasi calon penerima bantuan (CPB), dan penetapan lokasi desa/kelurahan dan CPB.

c. Penyiapan Masyarakat

Dilanjutkan untuk membuat organisasi CPB, sosialisasi dan penyuluhan, identifikasi kebutuhan perbaikan rumah, survey pemilihan toko/penyedia bahan bangunan, penyusunan proposal, pengusulan proposal, dan verifikasi dan persetujuan proposal.

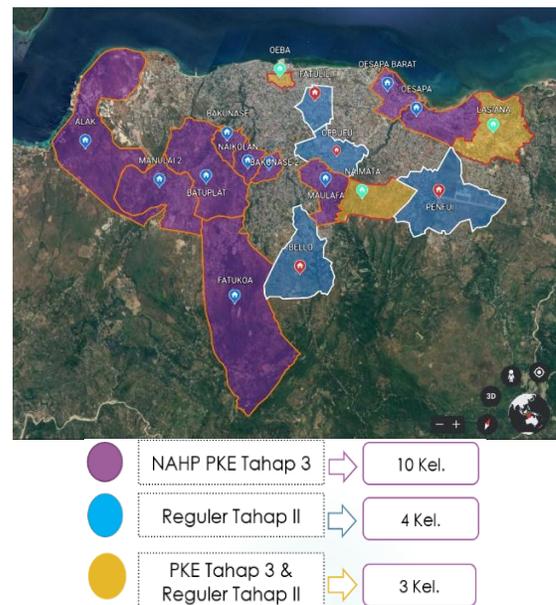
d. Pelaksanaan Kegiatan

Tahap ini adalah tahap pra-pelaksanaan, lalu dilakukan pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS), dan pelaporan.

e. Pemanfaatan Rumah

Langkah terakhir adalah penghunian dan pemeliharaan, dan pembinaan rumah penerima bantuan.

Dari hasil pelaksanaan program pada tahun anggaran 2022, di Kota Kupang terdapat **87** penerima bantuan yang lolos dalam tahap verifikasi. 87 penerimaan bantuan tersebut tersebar di **17** kelurahan dari **51** kelurahan yang ada di Kota Kupang. Di dalam kota ini terdapat dua jenis sumber dana dari bantuan yang ada, yaitu Alokasi dana program Reguler dan program NAHP atau *National Affordable Housing Program*.



Gambar 1. Peta Sebaran Penerima Bantuan per Kelurahan di Kota Kupang, NTT

Untuk mendapatkan sebuah program tentunya ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh calon penerima, hal ini juga berlaku pada Program BPS. Program ini memiliki beberapa kriteria bagi calon penerima bantuan untuk mendapatkan bantuan tersebut, yaitu: (1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga (penghuni rumah terdaftar dalam satu KK) atau keluarga yang hanya beranggotakan 1 orang penyandang disabilitas atau minimal berusia 58 tahun., (2) Memiliki/menguasai tanah dengan alas hak yang sah seperti sertifikat, akta hibah, akta jual beli, Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin kepala adat, atau bukti lainnya yang sah, (3) Berpenghasilan maksimal sebesar Upah Minimum Pekerja (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), (4) Memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, dan telah dimiliki dan dihuni minimal selama 3 tahun, (5) Belum pernah memperoleh BPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan dalam 10 tahun terakhir, kecuali terdampak

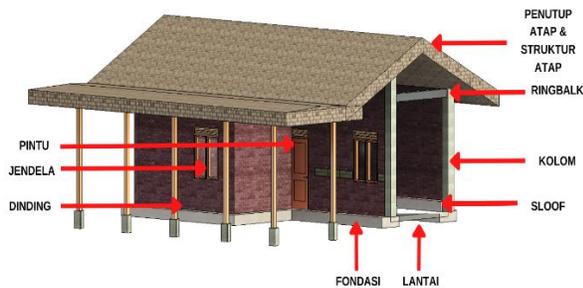
bencana atau berdasarkan ketentuan sebuah UU, (6) Bersedia melakukan swadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

Penolakan dan tidak melanjutkan program ini juga bisa dilakukan jika penerima bantuan memiliki alasan sebagai berikut: (1) Penerima bantuan meninggal dunia, (2) Penerima bantuan tidak mampu berswadaya, (3) Terdapat masalah pada status kepemilikan tanah, (4) Penerima bantuan merupakan seorang PNS atau Pensiunan, (5) Pernah mendapatkan bantuan yang sama, (6) Menolak bantuan dikarenakan terdapat bantuan lain yang nilainya lebih tinggi, (7) Penghasilan penerima bantuan melebihi Upah Minimum Pekerja (UMP)

Dalam mengukur sebuah rumah yang termasuk dalam kategori Rumah Layak Huni atau Rumah Tidak Layak Huni terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi, dalam kasus program ini, kriteria-kriteria yang terdapat pada Petunjuk Teknis, Surat Edaran Nomor 3/SE/Dr/2021 Direktorat Jenderal Perumahan,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu:

a. Penilaian Ketahanan Bangunan



Gambar 2. Komponen struktural dan non-struktural rumah satu lantai (didesain menggunakan Autodesk Revit)

Seluruh rumah perlu memiliki komponen-komponen struktural maupun non-struktural yang tertera pada Gambar 2 dan memenuhi penilaian yang ada. Penilaian ini berbasis pada beberapa Buku Aturan atau Standar Nasional Indonesia (SNI), diantaranya adalah menggunakan SNI 2847:2019 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung dan Penjelasan, SNI 1727:2020 tentang Beban Desain Minimum dan Kriteria Terkait untuk Bangunan Gedung dan Struktur lain, dan SNI itu adalah SNI

1726:2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung. Dari ketiga buku aturan tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk membangun sebuah rumah bantuan pada program BSPS ini rumah yang di desain harus memiliki: (1) Dimensi struktur yang sesuai dengan rencana desain dan aturan, (2) Seluruh elemen struktur utama tersambung sesuai SNI, (3) Mutu pengerjaan yang sesuai dan baik, (4) Kualitas bahan bangunan yang baik. (5) Kerikil dengan ukuran maksimal D-20mm, (6) Semen yang ber SNI dan tidak kering ataupun rusak, dan (7) Batu Belah yang keras dan tidak mudah pecah (batu kali, batu gunung), (8) Besi Tulangan yang ber SNI, tidak berkarat dan tidak bengkok permanen dan dengan ukuran D-10mm untuk besi tulangan utama dan ukuran D-8mm untuk tulangan angkur, (9) Kayu yang keras, padat, kering, tidak retak dan lurus, (10) Pasir yang bersih, (11) Batako/Bata yang permukaan mulus dan rata serta tidak retak dan tidak mudah patah, dan

(12) Pemasangan penutup atap/Seng/genteng yang kuat dan kokoh.

b. Penilaian Luas Bangunan

Standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan hunian adalah luas per-orang dihitung 7.2 m^2 dengan tinggi minimal bangunan sebesar 2.8 meter.

c. Penilaian Pencahayaan Bangunan

sarana pencahayaan diperlukan minimal sebanyak 10% (sepuluh persen) dari luas lantai ruangan. hal ini dikarenakan cahaya matahari dapat memberikan berbagai macam manfaat ketika memasuki ruangan didalam rumah.

d. Penilaian Penghawaan Bangunan

Penghawaan suatu rumah diperlukan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai ruangan

e. Penilaian Akses Air Minum

Dalam penilaian ini, air minum harus tidak berwarna dan tidak berbau, selain itu juga akses air minum perlu paling lama ditempuh selama $\pm \leq 30$ menit

f. Penilaian Sanitasi

Untuk sanitasi sendiri, aturan yang ada melarang untuk menggunakan toilet komunal dan menganggap jika tidak terdapat *septic tank*, dan *septic tank* tidak disedot dalam waktu 5 tahun, maka sanitasi tersebut tidak layak

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan dari laman web Kampus Merdeka yaitu sebagai Asisten atau Pendamping Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik, tugas utama yang dilakukan adalah melakukan tugas-tugasnya, namun tugas utama yang paling krusial adalah melakukan pengawasan atau monitoring. Jika tidak dilakukan, kegiatan, pengawas atau TFL akan tertinggal untuk mengetahui pembangunan struktur bangunan bagian dalam seperti pemasangan tulangan longitudinal dan sengkang, selain itu juga akan tertinggal dalam pengambilan dokumentasi untuk pengisian formular RA QAQC. Tidak jarang juga diminta untuk membantu menjadi tenaga tambahan dalam

sebuah pembangunan atau menjadi seorang tukang, tentunya hal ini juga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Dalam melakukan pengawasan dilapangan, ada beberapa kegiatan yang penting untuk dilakukan, diantaranya adalah:

a. Bercengkrama dan Mencatat Keluhan Warga

Dengan melakukan pendekatan kepada penerima bantuan ataupun masyarakat sekitar area pembangunan, terdapat banyak hal yang bisa didapatkan, seperti kendala pembangunan, kurangnya keswadayaan masyarakat, penerima bantuan yang mengalami kekurangan biaya, kendala pekerja, kendala material dan sebagainya. Dengan begitu poin ini menjadi salah satu poin paling penting untuk mendapatkan informasi mengenai pembangunan



Gambar 3. Dokumentasi Pendekatan kepada penerima bantuan dan pekerja bangunan

b. Pengukuran Komponen Bangunan

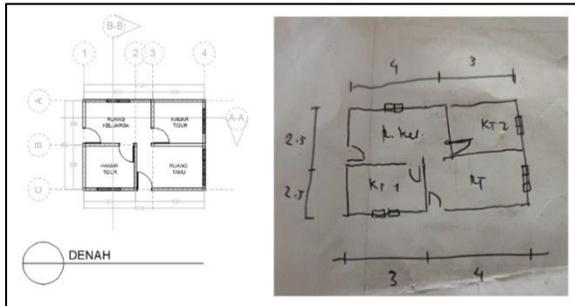
Pengukuran yang dilakukan perlu dilakukan, hal ini untuk membuktikan apakah pembangunan sudah sesuai dengan desain yang ada, atau tidak mengikuti desain. Pengukuran dilakukan disaat pembangunan dan setelah proses pembangunan berlangsung. Hal ini dibutuhkan untuk kepentingan pembuatan gambar teknis dalam pelaporan.



Gambar 4. Pengukuran komponen struktural dan nonstruktural di lapangan



Gambar 5. Gambar 3 dimensi desain bangunan baru untuk penerima bantuan menggunakan Lumion 9



Gambar 6. Penggambaran ulang sketsa denah bangunan eksisting menggunakan AutoCAD



Gambar 7. Gambar teknis desain rumah penerima bantuan menggunakan AutoCAD

c. Pengambilan Dokumentasi

Tanpa disangka, sebuah dokumentasi merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan, hal ini dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam mengambil suatu kejadian, penampakan suatu kesalahan struktur, atau penampakan suatu komponen di rumah penerima bantuan yang perlu diambil dokumentasinya guna memenuhi laporan-laporan yang ada.



Gambar 8. Pengambilan dokumentasi bangunan dan pembangunan

Di dalam program ini, terdapat 2 metode pembangunan yang dapat digunakan untuk

memperkuat atau membangun sebuah rumah, yang pertama adalah Metode Konvensional, metode ini lebih umum digunakan, seperti membangun rumah menggunakan struktur balok, struktur kolom, struktur fondasi, struktur sloof dengan menggunakan tulangan-tulangan didalamnya sebagai perkuatan struktur bangunan tersebut. Mayoritas masyarakat yang menerima bantuan memilih untuk menggunakan metode pertama dikarenakan lebih umum dan mudah untuk dikerjakan. Pekerjaan untuk metode ini juga tergolong lebih banyak pekerja bangunan yang mau bekerja. Namun walaupun tergolong umum, masih terdapat beberapa temuan yang didapat saat proyek pembangunan. Berikut adalah beberapa temuan kesalahan struktural maupun non-struktural pada lokasi:

Tabel 1. Kesalahan Struktural dan Nonstruktural yang Ditemukan saat Pengawasan.

No	Kesalahan	Dokumentasi
----	-----------	-------------

1.	<p>Tidak mengikuti anjuran standar penulangan kolom/ringbalk/sloof/balok yang tertera pada aturan SNI, PUPR maupun aturan Internasional seperti ACI 318 M-11 Pasal 10.9.2 yang menyatakan bahwa “menyatakan bahwa minimal harus dipasang empat buah tulangan memanjang untuk kolom</p>	
----	--	--

	dengan sengkang persegi atau lingkaran, minimal tiga buah untuk kolom berbentuk segitiga, serta minimal enam buah untuk kolom dengan sengkang spiral”	
2.	Lokasi <i>septictank</i> yang sulit untuk diakses dan tidak pernah diberishkan/”dis edot”	
3.	Angkur dan sambungan sudut tidak	

	terutup rapih/keseluruhan	
4.	Rangka atap induk menggunakan kayu yang sudah lapuk dan sudah tercoak/terukir. Akan mengakibatkan patah atau kegagalan struktur	
5.	Kondisi fondasi rumah sudah tidak layak,	

	perlu adanya perbaikan	
6.	Rumah penerima bantuan tidak memiliki ventilasi dan pintu pada bagian kamar, dapur, dan kamar mandi. Mengakibatkan bau yang tidak sedap didalam rumah	
7.	Bak air pada kamar mandi tidak dibersihkan mengakibatkan banyak jentik nyamuk dan	

	berlumut. Mengakibatkan sumber dari penyakit	
--	--	--

Kesalahan yang terjadi bervariasi, terdapat kesalahan sebelum pembangunan, saat pembangunan, dan setelah pembangunan. Bukan berarti kesalahan tersebut dapat ditolerir, kesalahan tersebut akan fatal akibatnya dan terjadi kegagalan struktur yang akan mengakibatkan atau mengancam keselamatan para penghuni bangunan. Dengan demikian, sesuai dengan fungsinya, Asisten Tenaga Fasilitator Lapangan bersama bimbingan dari pihak TFL membantu memberikan advis secara langsung di lokasi guna membantu memperbaiki kekurangan yang ada, tentunya dengan adanya bantuan ini, para penerima bantuan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada tersebut. Selain itu, pentingnya dalam sosialisasi bersama warga, perlu adanya sikap yang sabar, tidak egois, dan etika yang baik

dalam melakukan sosialisasi dan pemberian saran pada penerima bantuan atau pekerja bangunan.

Metode kedua yang digunakan adalah Metode Fero semen, metode ini merupakan metode alternatif yang digunakan sebagai pengganti Metode Konvensional, berbeda dengan metode lain, metode ini memanfaatkan ram-ram kawat sebagai perkuatan strukturnya. Metode Fero semen sendiri sebenarnya sudah ditemukan dan dipatenkan oleh seorang penemu berwarganegaraan Perancis Bernama Joseph-Louis Lambot pada tahun 1848, ciptaan yang paling terkenal adalah perahu fero semen. Namun kemudian Dr. Teddy Boen, M. Eng., Ph.D., seorang insinyur dari Indonesia melakukan pengagasan dan membuat inovasi dengan menerapkan Metode Fero semen pada bangunan rumah satu lantai, untuk menerapkan metode ini di Indonesia beliau bekerja sama dengan sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1956 di Amerika Serikat, ADRA atau *Adventist Development and Relief Agency (ADRA)* yang

merupakan sebuah lembaga kemanusiaan yang dioperasikan oleh Gereja Masehi Advent Hari ketujuh yang memiliki tujuan menyediakan pelatihan pengembangan masyarakat dan bantuan khususnya bencana alam. Di Indonesia sendiri kegiatan bantuan bencana alam sangat sering dilakukan. Salah satu lokasi untuk menerapkan metode ini pada rumah tinggal adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dari 87 rumah penerima bantuan yang terletak di Kota Kupang, hanya terdapat 11 rumah yang menerima pembangunan dengan metode ini, Terdapat dua jenis Metode Fero semen yang ada, yaitu Metode Fero semen menggunakan Ampig Bata dan Metode Fero semen menggunakan Ampig Batu. Untuk di Kota Kupang sendiri, 11 rumah tersebut menggunakan jenis Metode Fero semen menggunakan Ampig Bata.

Metode ini memanfaatkan beberapa bahan yang berbeda dengan Metode Konvensional, bahan-bahan tersebut adalah: (1) Paku paying/paku seng, (2) Paku beton, (3) Ram

kawat dengan $\pm \geq \emptyset 1\text{mm} - 2,5 \times 2,5\text{cm}$ dan lebar 100 cm, (4) kawat ikat/kawat bendrat, (5) Semen berlabel SNI, (6) Pasir bersih, (7) Botol kecap atau botol saus dengan moncong yang panjang, (8) gunting kawat, (9) ember, sendok semen, dan roskam, (10) Palu, (11) Bor atau alat pengganti bor. Langkah-langkah dan bahan secara detail terdapat pada buku *Membangun Rumah Tembokan Tahan Gempa dengan Balutab Lapisan Ferosemen* yang disusun oleh kemudian Dr. Teddy Boen, M. Eng., Ph.D.

Perkuatan metode ini telah terbukti tahan terhadap gempa, pengujian tersebut dilakukan pada tahun 2014, tepatnya Hari Kamis, 5 Juni 2014 di Tsukuba Jepang, Rumah dengan Metode Perkuatan Ferosemen di uji di meja getar, rumah tersebut dibandingkan dengan rumah satu lantai tanpa perkuatan apapun. Meskipun begitu, pengerjaan perkuatan struktur menggunakan Metode Ferosemen tergolong mudah namun rumit, pasalnya perlu pekerja yang banyak, teliti, dan cepat agar mampu selesai pada tepat waktu. Hal inilah yang terjadi pada beberapa lokasi

penerima bantuan dan salah satu tempat tersebut adalah Kelurahan Oebufu. Dalam kelurahan ini hanya terdapat 1 rumah yang menerima pembangunan dengan metode ini. Akibat dari tingkat keswadayaan yang minim, dan tidak ada yang mau bekerja menyelesaikan mengerjakan perkuatan dengan metode Ferosemen, rumah tersebut mengalami keterlamabatan pembangunan.



Gambar 9. Pengerjaan perkuatan metode ferosemen yang dilakukan oleh Asisten TFL atau peserta MSIB Kampus Merdeka Angkatan

Dari Asisten TFL, TFL, dan pihak Yayasan ADRA, rumah penerima bantuan di Kelurahan Oebufu tersebut dikerjakan bersama-sama secara bertahap. Tahapan pertama meliputi peninjauan lokasi, pengukuran eksisting rumah,

dokumentasi, dan meruntuhkan rumah eksisting. Tahap kedua ialah membangun rumah tembokan dengan batako dan tanpa sloof, kolom, dan ringbalk. Tahapan ketiga adalah memasang perkuatan Metode Fero semen dan pemlesteran, tahapan keempat adalah melakukan tahap penyelesaian seperti perapihan dan pembersihan.



Gambar 10. Pelaksanaan perkuatan menggunakan Metode Fero semen bersama Asisten TFL, TFL, dan Yayasan ADRA

3 dari 4 tahapan tersebut dilaksanakan dengan bantuan mahasiswa dan mahasiswi peserta MSIB atau Asisten TFL tanpa sebuah rekayasa atau scenario untuk pencitraan. Pekerjaan dilakukan pada setiap pukul 09:00 WITA hingga 18:00 WITA. Berikut adalah linimasa singkat dari kegiatan yang dilakukan di

lokasi pembangunan rumah penerima bantuan di Kelurahan Oebufu,

No	Tanggal	Dokumentasi	Kegiatan dan Hasil
1.	Senin, 05 September 2022		Survei lokasi dan pengukuran dimensi bangunan rumah awal
2.	12-13 September 2022		Pembongkaran rumah

3.	14-21 Septem ber 2022		Pembangu nan rumah tanpa perkuatan struktur konvensio nal (sloof, kolom, ringbalk)
4.	5 Okto ber-4 Nove mber 2022		Pekerjaan perkuatan dengan Metode Ferosemen dengan memasang ram-ram kawat, paku seng dan lainnya

			yang dibutuhkan
5.	7-10 Nove mber 2022		Kegiatan plesteran dan penutupan ram-ram kawat

Selama pembangunan menggunakan Metode Ferosemen, hal yang sering menjadi kendala adalah ketidakmauan pekerja bangunan untuk bekerja menggunakan metode tersebut. Ketidakmauan tersebut berasal dari rasa untuk tidak mau belajar hal baru, tidak mengerti metode tersebut, dan ketidaksesuaian upah yang diberikan. Padahal, pihak Asisten Tenaga Fasilitator Lapangan hingga pihak Yayasan ADRA sudah memberikan contoh cara

pengerjaanya, namun tetap saja pekerja tidak mau melanjutkan pekerjaan. Pada akhirnya hal ini mengakibatkan keterlambatan penyelesaian bangunan dari ketentuan batas waktu yang berlaku. Hal ini tidak berlaku di Kelurahan Oebufu saja, namun terjadi di kelurahan lain. Bahkan di Kelurahan Oesapa Barat, penerima bantuan sudah berkali-kali melakukan pergantian tukang, hal tersebut diakibatkan oleh upah yang tidak cukup serta sulitnya pengerjaan metode tersebut.

Tentunya dengan adanya program BPS ini, masyarakat sangat terbantu, banyak penerima bantuan yang ditemui merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Asisten TFL maupun TFL. Hal ini dikarenakan rumah yang dibangun dengan bantuan stimulan yang diberikan oleh pemerintah dengan keswadayaan warga membuahkan hasil yang positif. Rumah yang dibangun juga sudah sesuai dengan kaidah struktur yang ada, serta jauh lebih layak dibandingkan dengan rumah penerima bantuan sebelumnya.

Kesuksesan penyelenggaraan program ini dibuktikan dengan dilaksanakan kegiatan Pemasangan Peneng pada Kelurahan Naikolan yang dihadiri pejabat-pejabat Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR seperti Chandra Rudi Parulian Situmorang, S.T., M.T. sebagai Kepala Sub Direktorat Wilayah II, Yublina D. Bunga, S.T., M.T. sebagai Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, dan Dodi Kurniadi ST Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi NTT. Para pejabat yang turun langsung ke lokasi mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan penerima bantuan dengan diberikan cendramata berupa syal bermotif batik khas Pulau Rote. Kegiatan ini membuktikan bahwa Pelaksanaan Program BPS di Kota Kupang ini berjalan dengan cukup baik dan layak untuk di apresiasi.



Gambar 11. . Pelaksanaan kegiatan Pemasangan Peneng BPS di rumah penerima bantuan di Kelurahan Naikolan, Kota Kupang, NTT

Masalah umum yang ditemukan dalam pengerjaan kedua metode ini adalah masalah biaya dan pekerja, dengan penghasilan penerima bantuan yang kurang lebih \leq UMR Kota Kupang, pembangunan dapat terhambat akibat kekurangan biaya. Kota ini tercatat oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada tahun 2021 pernah menyentuh suhu sebesar 35°C , tentunya cuaca yang panas sangat mempengaruhi kinerja pekerja terutama pada siang hari. Umumnya pekerja bangunan bekerja pada menjelang sore hingga malam untuk menghindari teriknya sinar matahari. Selain itu,

dengan upah yang minimum, dengan total upah Rp.2.500.000, banyak pekerja yang tidak mau menerima upah pekerjaan sebanyak itu, dampaknya banyak penerima bantuan yang bekerja sendiri dan memanfaatkan tenaga dari tetangga ataupun keluarga yang ada. Sering ditemukan bahwa penerima bantuan melakukan kegiatan yang cukup riskan, seperti menjual asset kekayaan yang dimiliki hingga melakukan peminjaman uang. Tentunya hal ini patut untuk menjadi perhatian bersama dan dapat diberikan solusi lain agar tidak menyusahkan penerima bantuan.

Terdapat keunikan-keunikan yang ditemukan selama melakukan kegiatan pembangunan rumah di kota ini, diantaranya adalah:

- a. Tidak heran jika Kota Kupang mendapatkan julukan Kota Karang dikarenakan batu karang yang ada di kota ini sangat melimpah. Dengan sulitnya mencari batu kali atau batu gunung dikarenakan letak geografis yang berdekatan dengan pantai, penggunaan batu karang

sebagai material fondasi dan tanah urug lebih sering ditemukan di lokasi pembangunan, tidak hanya itu, pemanfaatan batu karang juga digunakan sebagai material utama batako.

- b. Disaat melakukan pengawasan ditemukan sebuah penolakan dari penerima bantuan untuk melengkapi struktur atap, hal ini dikarenakan terdapat sebuah mitos dan kepercayaan bahwa komponen struktur atap vertikal atau menghadap kebawah dapat membawa malapetaka, lebih tepatnya mampu mengancam nyawa penghuni dan menyebabkan kematian. Untuk mengatasi solusi ini, akhirnya diberikan saran untuk menggunakan bentuk rangka atap yang lain.
- c. Mayoritas material dasar dari rumah tradisional penerima bantuan sebelum dilakukan perbaikan berasal dari kayu bebak gewang, kayu ini memiliki nama latin *Coryphan utan*, tanaman ini hanya akan berbuah dan berbunga sekali dimasa hidupnya. Pohon ini memiliki tinggi rata-rata sebesar 15-20 meter. Pohon palma ini hanya

hidup di sekitara dataran rendah dan sekitar 300 mdpl. (Heyne, K 1987 & Sastroadja, 1981) Dipilihnya tanaman ini dikarenakan tanaman ini lebih murah, kuat, dan mayoritas lebih banyak di lokasi pulau ini.

D. PENUTUP

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk magang pada program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka Angkatan 3 di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur didapat beberapa kesimpulan, diantaranya adalah:

- a. Program MSIB Kampus Merdeka memberikan kesempatan untuk pesertanya untuk menjadi lebih berkembang dalam kemampuan lunak (*softskills*) dan kemampuan keras (*Hardskills*) serta mampu membuat peserta untuk beradaptasi menghadapi lingkungan baru seperti lingkungan perkantoran dan lingkungan masyarakat. Program ini juga membantu peserta magang berpartisipasi dalam kegiatan sosial dengan

tujuan mulia, yaitu mengabdikan kepada masyarakat, membantu masyarakat dalam pembangunan, dan mendukung masyarakat dalam menyelesaikan pembangunan rumah mereka. Program ini diperlukan untuk generasi yang akan datang agar dapat memiliki jiwa integritas, peduli, dan kualitas dalam diri agar menjadi lebih baik dan berbeda

- b. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan program yang cukup efektif dan terbilang mampu membantu mengatasi kemiskinan ekstrem di Kota Kupang, hal ini dibuktikan dengan rampungnya pembangunan 76 dari 87 rumah per 31 Desember 2022. Bahkan beberapa rumah sudah dilakukan pemasangan Peneng BSPS. Dengan rampungnya pembangunan tersebut, tentunya rumah yang dihuni sudah terjamin pembangunannya serta memenuhi kriteria rumah layak huni. Jika rumah-rumah penerima bantuan tersebut sudah tergolong rumah layak huni, diharapkan kedepannya

penerima bantuan dapat memperbaiki kualitas hidup sehari-hari seperti membersihkan lingkungan didalam rumah maupun diluar rumah, membersihkan sanitasi, membersihkan diri, serta mampu beristirahat di rumah dengan merasa nyaman dan aman. Sehingga pada akhirnya hal tersebut akan mengurangi tingkat kesetresan penerima bantuan dan mampu untuk memberikan lingkungan yang sehat untuk penerima bantuan dan warga sekitarnya. Kebutuhan dalam memperbaiki kondisi rumah yang dulu pun sudah terbantu dengan adanya bantuan dari program ini sehingga penerima bantuan dapat mengerahkan dana yang dimiliki untuk memenuhi akomodasi lain. Dengan demikian, diharapkan setelah ini Kota Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menurunkan persentase kemiskinan ekstrem.

- c. Meskipun program ini mampu untuk membantu masyarakat, namun dalam pembangunannya banyak terjadi kendala seperti kurangnya dana pembangunan, hal

tersebut membuat para penerima bantuan untuk melakukan penjualan aset yang mereka miliki dan bahkan tindakan hutang-piutang yang dapat membahayakan sistem keuangan yang dimiliki penerima bantuan kedepannya. Adapun kendala lain yang mengakibatkan pekerjaan pembangunan tertunda ialah: (1) Kurangnya rasa tanggung jawab penerima bantuan dalam pembangunan, (2) Masukan yang tidak dilakukan dari Asisten TFL dan TFL oleh penerima bantuan atau pekerja bangunan akibat merasa pengalaman tukang lebih utama, (3) Cuaca yang panas mengakibatkan seringnya tertunda pembangunan, dan (4) Pembangunan terhenti akibat penerima bantuan dan atau pekerja bangunan mabuk-mabukan hingga bersikap dan berkata kurang menyenangkan kepada Asisten TFL dan TFL.

d. Kekuatan struktur rumah menggunakan Metode Ferosemen adalah sebuah inovasi yang luar biasa, inovasi ini juga terbukti tahan terhadap guncangan gempa dan menjadi salah

satu metode pembangunan alternatif pada program BPS. Namun sayangnya pekerjaan ini belum tergolong umum dan cukup rumit untuk dikerjakan. Walaupun dikatakan lebih murah dari pekerjaan rumah konvensional banyak ditemukan penolakan, pasalnya pengerjaan pemasangan ram-ram kawat dapat memakan waktu yang cukup lama, hal ini akan menyebabkan pembangunan rumah tidak mencapai target pada tanggal yang sudah ditentukan. Selain itu, masih banyak tukang atau pekerja bangunan yang tidak mengerti metode ini walaupun sudah dilakukan sosialisasi dan pendampingan, terdapat beberapa kasus yang bahwa pekerja tidak mau bekerja menggunakan metode ini dikarenakan pelaksanaan yang rumit dan tidak biasa. Tidak hanya itu, penerima bantuan juga sempat kebingungan lantaran sudah mengganti-mengganti tukang untuk mengerjakan pembangunan rumah tersebut dengan alasan tukang menolak dibayar dengan upah Rp. 2.500.000. Hal ini terbukti dengan 11 rumah

penerima bantuan yang menerima perkuatan dengan menggunakan Metode Ferosemen tidak selesai per 31 Desember 2022.

Dari kesimpulan tersebut, peserta magang memberikan beberapa usulan agar dapat digunakan dan menjadi suatu solusi di kegiatan selanjutnya, yaitu:

- a. Lakukan penambahan dana bagi pekerja bangunan yang mengerjakan perkuatan menggunakan Metode Ferosemen agar nominal yang didapat lebih besar dari pekerja bangunan yang mengerjakan Metode Konvensional
- b. Disarankan untuk pihak yang melakukan pengambilan keputusan dan pihak yang melakukan verifikasi agar tidak melakukan pemaksaan terhadap calon penerima bantuan yang tidak mampu atau melakukan penolakan.

Padahal tercatat pada 2.3 Persyaratan Penerima Bantuan, Poin 6, Petunjuk Teknis, Surat Edaran Nomor 3/SE/Dr/2021 Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa syarat

penerima bantuan mendapatkan bantuan ini adalah bersedia dan mampu untuk berswadaya.

- c. Menjadi suatu kota yang memiliki keberagaman adat dan budaya merupakan anugerah terbesar yang dimiliki oleh suatu daerah. Ditambah dengan keunikan yang ada serta alam yang indah. Terlepas dari hal-hal tersebut, Kota Kupang masih perlu banyak melakukan perubahan. Terutama dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, perlu banyaknya program dari pemerintah yang mampu mendukung pembangunan infrastruktur di kota ini agar masyarakat kota ini memiliki pemukiman yang layak, kualitas pendidikan yang mumpuni, akses kesehatan yang terjangkau, serta lingkungan yang bersih dan sehat.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan dan jurnal ini tidak akan bisa ada jika tanpa pihak-pihak yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Diharapkan jurnal ini mampu untuk membantu calon peserta magang di

program MSIB Kampus Merdeka ataupun pihak lain yang membutuhkan jurnal ini sebagai wawasan, panduan, dan ilmu pengetahuan. Dengan kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa berterima kasih kepada: (1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia dan pihak program Magang atau Studi Independen Bersertifikat Angkatan 3 Kampus Merdeka, (2) Direktorat Jendral Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nusa Tenggara Timur, (3) Koordinator dan seluruh Tenaga Fasilitator Lapangan Kota Kupang 2022, (4) Mentor di lokasi kegiatan MSIB Angkatan 3, (5) Seluruh dosen dan staff yang mendukung penulis di Universitas Kristen Maranatha, (6) Seluruh peserta magang program MSIB Kampus Merdeka Angkatan 3 di Direktorat Jendral Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nusa Tenggara

F. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standarisasi Nasional. (2019). *Persyaratan Beton Struktural untuk bangunan Gedung dan Penjelasan (ACI 318M-14 dan ACI 318RM-14, MOD) SNI 2847:2019*. Jakarta
- Badan Standarisasi Nasional. (2019). *Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung*. SNI 1726:2019. Jakarta
- Boen, T. (2015) *Membangun Rumah Tembokan Tahan Gempa dengan Balutan Lapisan Fero semen*. Jakarta, Indonesia: CSI Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perumahan Kemnterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Surat Edaran Nomor 3/SE/Dr./2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perumahan Kemnterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan*

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403). Jakarta

Heyne, K. (1987). *Tumbuhan Berguna Indonesia.* Jakarta: Balitbang Kehutanan

Kuncoro, Mudrajad. (1997). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan,* Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

Kurniasih dkk. (2010). *Sehat dan Bugar Berkat Gizi Seimbang.* Jakarta: Gramedia.

Tallar, R.Y. (2022) *Pengantar Ilmu Lingkungan dalam Teknik Sipil.* Bandung: CV. Zahir Publishing

Yudohusodo, Siswono. (1991), *Rumah untuk Seluruh Rakyat.* Indonesia: Barakerta

PERAN PESERTA MSIB KAMPUS MERDEKA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS RUMAH SEBAGAI UPAYA MENANGANI KEMISKINAN EKSTREM DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR

Prabu Mandvi Hafiz Anjar Suhendar¹, Yosafat Aji Pranata^{2*}

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia ^{1,2}

* Penulis Korespondensi : yosafat.ap@gmail.com

Abstract

One of the primary human needs is to build and own a house. According to Siswono Yudohusodo (Rumah Untuk Seluruh Rakyat, 1991:432), a house serves as a living space and a location to raise a family. Therefore, without a house, humans will suffer to do things and survive. A home needs to fulfill the livable criteria so the resident can feel safe and comfortable while living inside their house. However, not all houses fulfill the livable criteria, one of the major factors is extreme poverty. In Indonesia, extreme poverty can be caused by many factors, one of them is low income. Extreme poverty can have a major impact on the condition of houses. One of the poorest provinces in Indonesia is East Nusa Tenggara, with a percentage of poverty in cities and villages at 20.50%, this number was obtained by the Indonesia Central Bureau of Statistics in March 2022. This article aims to deliver the contribution of Maranatha Christian University students who became an intern at MSIB Kampus Merdeka Batch 3 at the Directorate General of Human Settlement, Ministry of Public Works and Housing (PUPR) with the Self-Help Housing Stimulant Program (BSPS) in Kupang City, East Nusa Tenggara.

Keywords: *Extreme Poverty, Kupang City, Livable Criteria, Self-Help Housing Stimulant Program (BSPS)*

Abstrak

Kebutuhan primer manusia salah satunya adalah membangun dan memiliki tempat tinggal. Menurut Siswono Yudohusodo (Rumah Untuk Seluruh Rakyat, 1991: 432), rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sebuah sarana pembinaan keluarga. Sehingga tanpa adanya tempat tinggal manusia akan mengalami kesulitan melakukan kegiatan dan bertahan hidup. Sebuah tempat tinggal juga harus memenuhi kriteria layak huni agar penghuni dapat merasa aman dan nyaman saat didalam rumah tersebut. Namun faktanya tidak semua rumah masuk kedalam kategori layak huni, salah satu faktor utamanya diakibatkan oleh kemiskinan ekstrem. Di Indonesia, kemiskinan ekstrem mampu diakibatkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah. Kemiskinan ekstrem ini juga dapat berpengaruh besar terhadap kondisi tempat tinggal. Salah satu provinsi termiskin di Indonesia adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase kemiskinan perkotaan dan perdesaan dengan jumlah sebesar 20.50%. hasil ini diperoleh oleh Badan

Commented [R1]: Judul dipersingkat lagi agar mudah dipahami

Commented [R2]: Hilangkan teori di abstrak

Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2022. Artikel ini memiliki tujuan untuk menyampaikan hasil kontribusi dari mahasiswa Universitas Kristen Maranatha yang menjadi seorang peserta magang di MSIB Kampus Merdeka Angkatan 3 pada Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam mengatasi kemiskinan ekstrem bidang perumahan masyarakat dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Kata kunci: *Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kemiskinan Ektrem, Kota Kupang, Magang & Studi Independen Bersertifikat (MSIB).*

A. PENDAHULUAN

Menjadi seorang mahasiswa merupakan tanggung jawab yang besar dan harus menjadi pribadi yang aktif dan mandiri dalam kegiatan di dalam kampus maupun diluar kampus. Kegiatan yang dilakukan tentunya merupakan kegiatan positif yang dapat mendukung meningkatkan kemampuan, baik itu *hardskills* ataupun *softskills* mahasiswa. Tentunya dalam hal ini peran instansi baik dari pihak sekolah maupun kampus dan sebagainya, perlu mendukung secara penuh dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki para pelajarnya untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Universitas Kristen Maranatha juga turut mengambil peran dalam membantu mengembangkan kemampuan akademik maupun non-akademik agar

mendukung negara ini menjadi negara maju.

Salah satu langkah yang didukung adalah mempersiapkan mahasiswa dan mahasiswi untuk mengikuti program Magang & Studi Independen Bersertifikat (MSIB), Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu gagasan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Program ini memiliki kebijakan dan keuntungan yang berbeda dari program magang dari biasanya. Program ini juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa dan mahasiswi agar dapat melaksanakan kegiatan diluar program studi dan mendapatkan pengalaman untuk mempraktikan ilmu yang didapat kedalam lingkungan yang nyata, selain itu program ini juga mendukung mahasiswa dan mahasiswi

dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan seperti bantuan Bantuan Biaya Hidup (BBH), fasilitas biaya perjalanan dari tempat tinggal ke lokasi magang, dan juga Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Program ini juga membantu mahasiswa dan mahasiswi di Indonesia untuk dapat meningkatkan kompetensi mereka. Kompetensi perlu dipersiapkan untuk menghadapi perubahan sosial, budaya, kemajuan teknologi, dan juga kehidupan di dunia kerja. Tujuan program ini juga bisa dijadikan sebuah alternatif pengganti dari mata kuliah Magang atau Kerja Praktek (KP) atau juga sebagai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Sehingga diharapkan dengan adanya program ini mahasiswa dan mahasiswa mendapatkan kesempatan bekerja bersama mitra-mitra terkait. Salah satu mitra yang menyediakan lowongan program magang dalam MSIB Angkatan 3 pada Tahun 2022 adalah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Kementerian Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam pembangunan di bidang konstruksi. Kementerian PUPR memfokuskan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tertera pada Peraturan Presiden Pasal 4 Nomor 27 Tahun 2020.

Kegiatan magang yang mulai dilaksanakan pada 18 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2022 atau kurang lebih 5 bulan jika terhitung pendaftaran ini meerangkul banyak pekerjaan, Adapun posisi yang diberikan adalah Pendamping Fasilitator Teknik kegiatan BSPS dan Pendamping Fasilitator Pemberdayaan Kegiatan BSPS. Adapun kegiatan dan tujuan yang dilaksanakan dalam kegiatan adalah: (a) Membantu melakukan pengawasan pembangunan penerima bantuan, (b) Membantu mengambil dokumentasi di lapangan, (c) Membantu mengambil data yang dibutuhkan di lapangan (d) Menjadi pekerja bangunan atau kuli

bangunan dalam pembangunan rumah, (e) Membantu mengurus bagian administrasi penerima bantuan, (f) Membantu mengisi formulir *Quality Assesment & Quality Control*, (f) Membantu melengkapi gambar teknik rumah penerima bantuan, (g) Membantu melengkapi gambar teknik rumah penerima bantuan, (h) Membantu melengkapi gambar teknik rumah penerima bantuan, (i) Membantu melengkapi data pada BNBA, (j) Membantu melengkapi laman web *www.sirus.perumahan.pu.go.id*, (k) Membantu pemeriksaan Laporan Individu dan Laporan Kelompok Penerima Bantuan BSPS, (l) Membantu menjadi panitia dalam Acara Rapat Koodinasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebagai asisten dari Tenaga Fasilitator Lapangan tentunya tugas yang didapat juga tidak jauh berbeda, namun salah satu tugas utama dan paling penting adalah melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang berlangsung selama periode yang ada. Sebagai mahasiswa magang tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah. Berperan dalam membantu menjalankan sebuah

program dari pemerintah dengan tujuan yang mulia, yaitu mengatasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) bukanlah sebuah hal yang mudah, pasalnya dalam pelaksanaannya, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi. Terutama saat menghadapi masyarakat dengan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, serta memiliki perbedaan latar belakang dan bahasa. Kendala-kendala tersebut juga dapat dirasakan oleh peserta Magang dalam Program MSIB Angkatan 3 yang lain.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang memiliki pulau lebih banyak dari provinsi lain, terdapat **1.192** pulau dalam provinsi ini. Tentunya dari sekian banyak pulau tersebut, pemerintah terus berupaya melakukan perhitungan yang matang serta pembangunan yang merata agar dapat memenuhi masyarakat di provinsi ini. Salah satu fokus pemerintah dalam pembangunan adalah pembangunan rumah tinggal. Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia Periode 2019-2024

menyampaikan sebuah instruksi bahwa Kementerian PUPR perlu mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, salah satunya dengan melalui perbaikan rumah. Sehingga, sejak 2021 hingga 2024 mendatang, pemerintah berupaya mencapai target, yaitu mengatasi kemiskina ekstrem di **514** Kabupaten dan Kota agar persentase kemiskinan ekstrem mencapai dibawah **1%**. Hasil dari instruksi tersebut, melalui Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, memilih untuk memfokuskan beberapa aspek melalui programnya, diantaranya adalah percepatan penurunan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan kualitas RTLH, penanganan stunting dan penderita TBC, dan penanganan kawasan perumahan dan pemukiman kumuh terintegrasi.

Mengatasi kemiskinan ekstrem tentunya bukanlah hal yang mudah, Menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa atau KBBI, kata “miskin” memiliki arti sebagai tidak berharta dan serba kekurangan. Lalu kata “ekstrem” adalah yang paling ujung, yang paling tinggi dan yang paling

keras. Definisi yang berasal dari KBBI mengenai kata “miskin” dan “ekstrem” memiliki makna bahwa masyarakat miskin ekstrem merupakan golongan masyarakat yang paling tidak berharta dan yang paling serba kekurangan dalam bentuk harta. Kata miskin juga memiliki arti bahwa miskin adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 1997). Sementara itu menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations* (UN) pada tahun 1996 menjelaskan bahwa Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (*United Nations*, 1996). Tingkat kemiskinan ekstrem dapat diukur menggunakan “*absolute poverty measure*” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Kemiskina ekstrem didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki pengasihian di bawah **US\$1.9 PPP** (*Purchasing*

Power Parity) / paritas daya beli, atau setara dengan **Rp29.378** (30 Desember 2022). Lingkungan yang tidak sehat tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan manusia, terutama seorang anak. Masa balita merupakan sebuah periode yang sangat peka terhadap lingkungan sehingga diperlukan perhatian lebih terutama kecukupan gizinya. Salah satu yang menjadi prioritas pemberantasan oleh pemerintah adalah kondisi stunting. Dikutip dari laman web Kementerian Kesehatan, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Diharapkan dengan adanya perbaikan lingkungan hidup, akan memperbaiki kesehatan dari penghuninya terutama generasi penerus bangsa.

Kota Kupang memiliki luas wilayah sebesar **180.3Km²** atau sekitar 18.030 hektar. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di Kota Kupang (2020), kota ini memiliki **442.758.000** jiwa penduduk,

dengan tingkat persentase kemiskinan sebesar **8.61%** per tahun 2022. Tentunya angka 8.61% bukanlah angka yang baik, ditambah lagi dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) provinsi ini berjumlah **Rp 1.950.00** yang sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan UMP Kota Jakarta sebesar **Rp 4.641.854**. Hal ini masih menjadi target pemerintah Kota Kupang untuk menangani kemiskinan ekstrem, ditambah lagi dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki tingkan kemiskinan provinsi ini sebanyak **20.05%** dari **1.131.620** penduduk.

Tentunya hal-hal tersebut terkoneksi dan saling berhubungan, perlu adanya sebuah program dari pemerintah yang mampu membantu mengurangi masalah tersebut. Maka dari itu salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia, pemerintah memberikan program-program yang inovatif dan terintegrasi, salah satunya adalah Program BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program yang digarap oleh

pemerintah, di instruksikan oleh presiden dan dijalankan oleh Kementerian PUPR. Dalam BPS terdapat kata “stimulan” dan “swadaya” yang kurang umum bagi pandangan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, stimulan adalah sesuatu yang menjadi cambuk bagi peningkatan prestasi atau semangat bekerja, atau pendorong dan perangsang. Untuk kata “swadaya” sendiri memiliki arti bahwa swadaya adalah kekuatan tenaga sendiri. Sehingga arti dalam garis Bahasa yang ada bahwa program ini merupakan sebuah pendorong bagi masyarakat untuk dapat mengerjakan pembangunan rumah mereka dengan tenaga sendiri, uang sendiri, atau bantuan orang lain. Penyelenggaraan program ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak dasar rakyat di Indonesia untuk bertempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat.

Pemerintah membentuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan atau disingkat BP2P yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun

2020. BP2P merupakan Unit Pelaksana Teknis Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan khususnya Direktorat Rumah Swadaya yang termasuk BPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. BPS memiliki sebuah tujuan yang terfokus dalam beberapa aspek, aspek-aspek ini merupakan sebuah poin penting yang perlu dituju dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, menjalankan instruksi Presiden, dan memenuhi tujuan-tujuan dalam pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yang di tentukan oleh *United Nations*. Dari ke tujuh belas tujuan, program ini terlihat berfokus menangani 3 tujuan, yaitu: (a) Tujuan 1, *No Poverty* atau Tanpa Kemiskinan, (b) Tujuan 2, *Good Health and Well Being* atau Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (c) *Clean Water and Sanitation* atau Air Bersih dan Sanitasi Layak.

Sebuah program tentunya memiliki dasar hukum agar memperlancar segala urusan dan tujuannya, Berdasarkan Petunjuk Teknis, Surat Edaran Nomor 3/SE/Dr/2021 Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, dengan judul Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS sendiri memiliki 8 dasar hukum, salah satunya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403).

Dari dasar-dasar hukum tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah dana untuk kebutuhan program ini, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dana yang diberikan oleh pemerintah untuk satu penerima bantuan adalah sebesar Rp20.000.000, dengan rincian, Rp 17.500.000 untuk material dan biaya lainnya dan Rp 2.500.000 untuk upah tukang. Dana tersebut digunakan sebagai stimulan untuk warga dalam membangun dan memperbaiki kondisi rumah. Dana tersebut berasal dari APBN atau (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dana bantuan ini disalurkan tidak dengan uang tunai atau *cash* langsung kepada penerima

bantuan, tetapi uang tersebut di simpan di pihak bank atau pos penyalur yang nantinya dibelanjakan material sesuai pengawasan dan pengarahan Tenaga Fasilitator Lapangan. Tujuannya agar dana bantuan tidak disalahgunakan. Nantinya penggunaan dana tersebut juga akan dilaporkan melalui Laporan Penggunaan Dana atau LPD secara bertahap (LPD 1 & LPD 2).

B. METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah melaksanakan beberapa tahapan sesuai pada Petunjuk Teknis, Surat Edaran Nomor 3/SE/Dr/2021 Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan judul Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yaitu:

a. Persiapan Kegiatan

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pengusulan lokasi, lalu melakukan verifikasi/penilaian usulan, penetapan lokasi,

Commented [R3]: Bagian ini lebih di ringkas lagi agar mudah dipahami, Silahkan ikuti penulisan template jurnal apa saja yang merupakan bagian dari metode.

seleksi/pengolahan data, dan penyampaian daftar calon penerima bantuan.

b. Perencanaan Kegiatan

Kegiatan kedua adalah melakukan pembentukan tim pelaksana, seleksi bank/pos penyalur, pembekalan dan mobilisasi tim pelaksana, seleksi dan verifikasi calon penerima bantuan (CPB), dan penetapan lokasi desa/kelurahan dan CPB.

c. Penyiapan Masyarakat

Dilanjutkan untuk membuat organisasi CPB, sosialisasi dan penyuluhan, identifikasi kebutuhan perbaikan rumah, survey pemilihan toko/penyedia bahan bangunan, penyusunan proposal, pengusulan proposal, dan verifikasi dan persetujuan proposal.

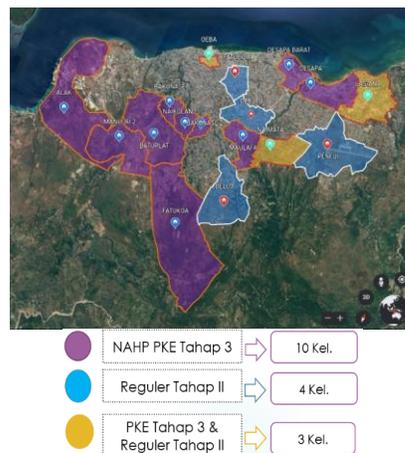
d. Pelaksanaan Kegiatan

Tahap ini adalah tahap pra-pelaksanaan, lalu dilakukan pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS), dan pelaporan.

e. Pemanfaatan Rumah

Langkah terakhir adalah penghunian dan pemeliharaan, dan pembinaan rumah penerima bantuan.

Dari hasil pelaksanaan program pada tahun anggaran 2022, di Kota Kupang terdapat **87** penerima bantuan yang lolos dalam tahap verifikasi. 87 peneriman bantuan tersebut tersebar di **17** kelurahan dari **51** kelurahan yang ada di Kota Kupang. Di dalam kota ini terdapat dua jenis sumber dana dari bantuan yang ada, yaitu Alokasi dana program Reguler dan program NAHP atau *National Affordable Housing Program*.



Gambar 1. Peta Sebaran Penerima Bantuan per Kelurahan di Kota Kupang, NTT

Untuk mendapatkan sebuah program tentunya ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh calon penerima, hal ini juga berlaku pada Program BSPS. Program ini memiliki beberapa kriteria bagi calon penerima bantuan untuk mendapatkan bantuan tersebut, yaitu: (1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga (penghuni rumah terdaftar dalam satu KK) atau keluarga yang hanya beranggotakan 1 orang penyandang disabilitas atau minimal berusia 58 tahun., (2) Memiliki/menguasai tanah dengan alas hak yang sah seperti sertifikat, akta hibah, akta jual beli, Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin kepala adat, atau bukti lainnya yang sah, (3) Berpenghasilan maksimal sebesar Upah Minimum Pekerja (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), (4) Memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, dan telah dimiliki dan dihuni minimal selama 3 tahun, (5) Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan dalam 10 tahun terakhir, kecuali terdampak

bencana atau berdasarkan ketentuan sebuah UU, (6) Bersedia melakukan swadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

Penolakan dan tidak melanjutkan program ini juga bisa dilakukan jika penerima bantuan memiliki alasan sebagai berikut: (1) Penerima bantuan meninggal dunia, (2) Penerima bantuan tidak mampu berswadaya, (3) Terdapat masalah pada status kepemilikan tanah, (4) Penerima bantuan merupakan seorang PNS atau Pensiunan, (5) Pernah mendapatkan bantuan yang sama, (6) Menolak bantuan dikarenakan terdapat bantuan lain yang nilainya lebih tinggi, (7) Penghasilan penerima bantuan melebihi Upah Minimum Pekerja (UMP)

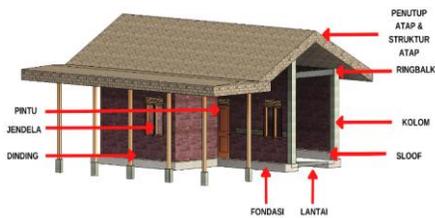
Dalam mengukur sebuah rumah yang termasuk dalam kategori Rumah Layak Huni atau Rumah Tidak Layak Huni terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi, dalam kasus program ini, kriteria-kriteria yang terdapat pada Petunjuk Teknis, Surat Edaran Nomor 3/SE/Dr/2021 Direktorat Jenderal Perumahan,

Commented [R4]: Sebaiknya, hal-hal yang bersifat teknis seperti ini tidak perlu disajikan di dalam artikel.

Fokus kepada inti dari metode yang digunakan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu:

a. Penilaian Ketahanan Bangunan



Gambar 2. Komponen struktural dan non-struktural rumah satu lantai (didesain menggunakan Autodesk Revit)

Seluruh rumah perlu memiliki komponen-komponen struktural maupun non-struktural yang tertera pada Gambar 2 dan memenuhi penilaian yang ada. Penilaian ini berbasis pada beberapa Buku Aturan atau Standar Nasional Indonesia (SNI), diantaranya adalah menggunakan SNI 2847:2019 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung dan Penjelasan, SNI 1727:2020 tentang Beban Desain Minimum dan Kriteria Terkait untuk Bangunan Gedung dan Struktur lain, dan SNI itu adalah SNI

1726:2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung. Dari ketiga buku aturan tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk membangun sebuah rumah bantuan pada program BSPPS ini rumah yang di desain harus memiliki: (1) Dimensi struktur yang sesuai dengan rencana desain dan aturan, (2) Seluruh elemen struktur utama tersambung sesuai SNI, (3) Mutu pengerjaan yang sesuai dan baik, (4) Kualitas bahan bangunan yang baik. (5) Kerikil dengan ukuran maksimal D-20mm, (6) Semen yang ber SNI dan tidak kering ataupun rusak, dan (7) Batu Belah yang keras dan tidak mudah pecah (batu kali, batu gunung), (8) Besi Tulangan yang ber SNI, tidak berkarat dan tidak bengkok permanen dan dengan ukuran D-10mm untuk besi tulangan utama dan ukuran D-8mm untuk tulangan angkur, (9) Kayu yang keras, padat, kering, tidak retak dan lurus, (10) Pasir yang bersih, (11) Batako/Bata yang permukaan mulus dan rata serta tidak retak dan tidak mudah patah, dan

- (12) Pemasangan penutup atap/Seng/genteng yang kuat dan kokoh.
- b. Penilaian Luas Bangunan
- Standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan hunian adalah luas per-orang dihitung 7.2 m² dengan tinggi minimal bangunan sebesar 2.8 meter.
- c. Penilaian Pencahayaan Bangunan
- sarana pencahayaan diperlukan minimal sebanyak 10% (sepuluh persen) dari luas lantai ruangan. hal ini dikarenakan cahaya matahari dapat memberikan berbagai macam manfaat ketika memasuki ruangan didalam rumah.
- d. Penilaian Penghawaan Bangunan
- Penghawaan suatu rumah diperlukan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai ruangan
- e. Penilaian Akses Air Minum
- Dalam penilaian ini, air minum harus tidak berwarna dan tidak berbau, selain itu juga akses air minum perlu paling lama ditempuh selama $\pm \leq 30$ menit

f. Penilaian Sanitasi

Untuk sanitasi sendiri, autran yang ada melarang untuk menggunakan toilet komunal dan menganggap jika tidak terdapat *septic tank*, dan *septic tank* tidak disedot dalam waktu 5 tahun, maka sanitasi tersebut tidak layak

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan dari laman web Kampus Merdeka yaitu sebagai Asisten atau Pendamping Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik, tugas utama yang dilakukan adalah melakukan tugas-tugasnya, namun tugas utama yang paling krusial adalah melakukan pengawasan atau monitoring. Jika tidak dilakukan, kegiatan, pengawas atau TFL akan tertinggal untuk mengetahui pembangunan struktur bangunan bagian dalam seperti pemasangan tulangan longitudinal dan sengkang, selain itu juga akan tertinggal dalam pengambilan dokumentasi untuk pengisian formular RA QAQC. Tidak jarang juga diminta untuk membantu menjadi tenaga tambahan dalam

Commented [R5]: Saran, peletakan foto dan tabel mohon disesuaikan dengan template jurnal

1. Usahakan tidak ada foto di dalam tabel
2. Masukkan foto yang penting dan mewakili kegiatan Pengabdian
3. Ikuti metode penelitian di dalam penyusunan pembahasan sehingga lebih ringkas
4. Penjelasan terlalu lebar dan masih terdapat unsur-unsur yang diulang berkali-kali.

Silahkan perbaiki sesuai saran.

sebuah pembangunan atau menjadi seorang tukang, tentunya hal ini juga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Dalam melakukan pengawasan dilapangan, ada beberapa kegiatan yang penting untuk dilakukan, diantaranya adalah:

- a. Bercengkrama dan Mencatat Keluhan Warga
Dengan melakukan pendekatan kepada penerima bantuan ataupun masyarakat sekitar area pembangunan, terdapat banyak hal yang bisa didapatkan, seperti kendala pembangunan, kurangnya keswadayaan masyarakat, penerima bantuan yang mengalami kekurangan biaya, kendala pekerja, kendala material dan sebagainya. Dengan begitu poin ini menjadi salah satu poin paling penting untuk mendapatkan informasi mengenai pembangunan



Gambar 3. Dokumentasi Pendekatan kepada penerima bantuan dan pekerja bangunan

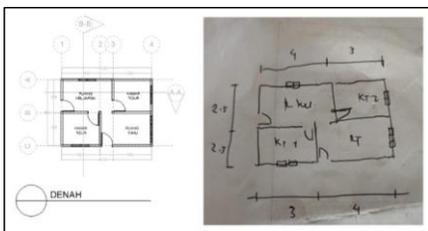
- b. Pengukuran Komponen Bangunan
Pengukuran yang dilakukan perlu dilakukan, hal ini untuk membuktikan apakah pembangunan sudah sesuai dengan desain yang ada, atau tidak mengikuti desain. Pengukuran dilakukan disaat pembangunan dan setelah proses pembangunan berlangsung. Hal ini dibutuhkan untuk kepentingan pembuatan gambar teknis dalam pelaporan.



Gambar 4. Pengukuran komponen struktural dan nonstruktural di lapangan



Gambar 5. Gambar 3 dimensi desain bangunan baru untuk penerima bantuan menggunakan Lumion 9



Gambar 6. Penggambaran ulang sketsa denah bangunan eksisting menggunakan AutoCAD



Gambar 7. Gambar teknis desain rumah penerima bantuan menggunakan AutoCAD

c. Pengambilan Dokumentasi

Tanpa disangka, sebuah dokumentasi merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan, hal ini dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam mengambil suatu kejadian, penampakan suatu kesalahan struktur, atau penampakan suatu komponen di rumah penerima bantuan yang perlu diambil dokumentasinya guna memenuhi laporan-laporan yang ada.



Gambar 8. Pengambilan dokumentasi bangunan dan pembangunan

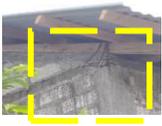
Di dalam program ini, terdapat 2 metode pembangunan yang dapat digunakan untuk

memperkuat atau membangun sebuah rumah, yang pertama adalah Metode Konvensional, metode ini lebih umum digunakan, seperti membangun rumah menggunakan struktur balok, struktur kolom, struktur fondasi, struktur sloof dengan menggunakan tulangan-tulangan didalamnya sebagai perkuatan struktur bangunan tersebut. Mayoritas masyarakat yang menerima bantuan memilih untuk menggunakan metode pertama dikarenakan lebih umum dan mudah untuk dikerjakan. Pekerjaan untuk metode ini juga tergolong lebih banyak pekerja bangunan yang mau bekerja. Namun walaupun tergolong umum, masih terdapat beberapa temuan yang didapat saat proyek pembangunan. Berikut adalah beberapa temuan kesalahan struktural maupun non-struktural pada lokasi:

Tabel 1. Kesalahan Struktural dan Nonstruktural yang Ditemukan saat Pengawasan.

No	Kesalahan	Dokumentasi
----	-----------	-------------

1.	<p>Tidak mengikuti anjuran standar penulangan kolom/ringbalk/sloof/balok yang tertera pada aturan SNI, PUPR maupun aturan Internasional seperti ACI 318 M-11 Pasal 10.9.2 yang menyatakan bahwa “menyatakan bahwa minimal harus dipasang empat buah tulangan memanjang untuk kolom</p>	
----	--	---

	dengan sengkang persegi atau lingkaran, minimal tiga buah untuk kolom berbentuk segitiga, serta minimal enam buah untuk kolom dengan sengkang spiral”	
2.	Lokasi <i>septic tank</i> yang sulit untuk diakses dan tidak pernah diberishkan/”dis edot”	
3.	Angkur dan sambungan sudut tidak	

	terutup rapih/keseluruhan	
4.	Rangka atap induk menggunakan kayu yang sudah lapuk dan sudah tercoak/terukir. Akan mengakibatkan patah atau kegagalan struktur	
5.	Kondisi fondasi rumah sudah tidak layak,	

	perlu adanya perbaikan	
6.	Rumah penerima bantuan tidak memiliki ventilasi dan pintu pada bagian kamar, dapur, dan kamar mandi. Mengakibatkan bau yang tidak sedap didalam rumah	
7.	Bak air pada kamar mandi tidak dibersihkan mengakibatkan banyak jentik nyamuk dan	

	berlumut. Mengakibatkan sumber dari penyakit	
--	--	--

Kesalahan yang terjadi bervariasi, terdapat kesalahan sebelum pembangunan, saat pembangunan, dan setelah pembangunan. Bukan berarti kesalahan tersebut dapat ditolerir, kesalahan tersebut akan fatal akibatnya dan terjadi kegagalan struktur yang akan mengakibatkan atau mengancam keselamatan para penghuni bangunan. Dengan demikian, sesuai dengan fungsinya, Asisten Tenaga Fasilitator Lapangan bersama bimbingan dari pihak TFL membantu memberikan advis secara langsung di lokasi guna membantu memperbaiki kekurangan yang ada, tentunya dengan adanya bantuan ini, para penerima bantuan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada tersebut. Selain itu, pentingnya dalam sosialisasi bersama warga, perlu adanya sikap yang sabar, tidak egois, dan etika yang baik

dalam melakukan sosialisasi dan pemberian saran pada penerima bantuan atau pekerja bangunan.

Metode kedua yang digunakan adalah Metode Fero semen, metode ini merupakan metode alternatif yang digunakan sebagai pengganti Metode Konvensional, berbeda dengan metode lain, metode ini memanfaatkan ram-ram kawat sebagai perkuatan strukturnya. Metode Fero semen sendiri sebenarnya sudah ditemukan dan dipatenkan oleh seorang penemu berwarganegara Perancis bernama Joseph-Louis Lambot pada tahun 1848, ciptaan yang paling terkenal adalah perahu fero semen. Namun kemudian Dr. Teddy Boen, M. Eng., Ph.D., seorang insinyur dari Indonesia melakukan pengagasan dan membuat inovasi dengan menerapkan Metode Fero semen pada bangunan rumah satu lantai, untuk menerapkan metode ini di Indonesia beliau bekerja sama dengan sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1956 di Amerika Serikat, ADRA atau *Adventist Development and Relief Agency (ADRA)* yang

merupakan sebuah lembaga kemanusiaan yang dioperasikan oleh Gereja Masehi Advent Hari ketujuh yang memiliki tujuan menyediakan pelatihan pengembangan masyarakat dan bantuan khususnya bencana alam. Di Indonesia sendiri kegiatan bantuan bencana alam sangat sering dilakukan. Salah satu lokasi untuk menerapkan metode ini pada rumah tinggal adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dari 87 rumah penerima bantuan yang terletak di Kota Kupang, hanya terdapat 11 rumah yang menerima pembangunan dengan metode ini, Terdapat dua jenis Metode Fero semen yang ada, yaitu Metode Fero semen menggunakan Ampig Bata dan Metode Fero semen menggunakan Ampig Batu. Untuk di Kota Kupang sendiri, 11 rumah tersebut menggunakan jenis Metode Fero semen menggunakan Ampig Bata.

Metode ini memanfaatkan beberapa bahan yang berbeda dengan Metode Konvensional, bahan-bahan tersebut adalah: (1) Paku payung/paku seng, (2) Paku beton, (3) Ram

kawat dengan $\pm \geq \emptyset 1 \text{ mm}$ - 2,5 x 2,5cm dan lebar 100 cm, (4) kawat ikat/kawat bendrat, (5) Semen berlabel SNI, (6) Pasir bersih, (7) Botol kecap atau botol saus dengan moncong yang panjang, (8) gunting kawat, (9) ember, sendok semen, dan roskam, (10) Palu, (11) Bor atau alat pengganti bor. Langkah-langkah dan bahan secara detail terdapat pada buku *Membangun Rumah Tembokan Tahan Gempa dengan Balutab Lapisan Ferosemen* yang disusun oleh kemudian Dr. Teddy Boen, M. Eng., Ph.D.

Perkuatan metode ini telah terbukti tahan terhadap gempa, pengujian tersebut dilakukan pada tahun 2014, tepatnya Hari Kamis, 5 Juni 2014 di Tsukuba Jepang, Rumah dengan Metode Perkuatan Ferosemen di uji di meja getar, rumah tersebut dibandingkan dengan rumah satu lantai tanpa perkuatan apapun. Meskipun begitu, pengerjaan perkuatan struktur menggunakan Metode Ferosemen tergolong mudah namun rumit, pasalnya perlu pekerja yang banyak, teliti, dan cepat agar mampu selesai pada tepat waktu. Hal inilah yang terjadi pada beberapa lokasi

penerima bantuan dan salah satu tempat tersebut adalah Kelurahan Oebufu. Dalam kelurahan ini hanya terdapat 1 rumah yang menerima pembangunan dengan metode ini. Akibat dari tingkat keswadayaan yang minim, dan tidak ada yang mau bekerja menyelesaikan mengerjakan perkuatan dengan metode Ferosemen, rumah tersebut mengalami keterlamabatan pembangunan.



Gambar 9. Pengerjaan perkuatan metode ferosemen yang dilakukan oleh Asisten TFL atau peserta MSIB Kampus Merdeka Angkatan

3

Dari Asisten TFL, TFL, dan pihak Yayasan ADRA, rumah penerima bantuan di Kelurahan Oebufu tersebut dikerjakan bersama-sama secara bertahap. Tahapan pertama meliputi peninjauan lokasi, pengukuran eksisting rumah,

Commented [R7]: Maksud kalimat ini?

Commented [R6]: Maksud kalimat ini?

dokumentasi, dan meruntuhkan rumah eksisting. Tahap kedua ialah membangun rumah tembokan dengan batako dan tanpa sloof, kolom, dan ringbalk. Tahapan ketiga adalah memasang perkuatan Metode Ferosemen dan pemlesteran, tahapan keempat adalah melakukan tahap penyelesaian seperti perapihan dan pembersihan.



Gambar 10. Pelaksanaan perkuatan menggunakan Metode Ferosemen bersama Asisten TFL, TFL, dan Yayasan ADRA

3 dari 4 tahapan tersebut dilaksanakan dengan bantuan mahasiswa dan mahasiswi peserta MSIB atau Asisten TFL tanpa sebuah rekayasa atau scenario untuk pencitraan. Pekerjaan dilakukan pada setiap pukul 09:00 WITA hingga 18:00 WITA. Berikut adalah linimasa singkat dari kegiatan yang dilakukan di

lokasi pembangunan rumah penerima bantuan di Kelurahan Oebufu,

No	Tanggal	Dokumentasi	Kegiatan dan Hasil
1.	Senin, 05 September 2022		Survei lokasi dan pengukuran dimensi bangunan rumah awal
2.	12-13 September 2022		Pembongkaran rumah

3.	14-21 Septem ber 2022		Pembangu nan rumah tanpa perkuatan struktur konvensio nal (sloof, kolom, ringbalk)
4.	5 Okto ber-4 Nove mber 2022		Pekerjaan perkuatan dengan Metode Ferosemen dengan memasang ram-ram kawat, paku seng dan lainnya

			yang dibutuhkan
5.	7-10 Nove mber 2022		Kegiatan plesteran dan penutupan ram-ram kawat

Selama pembangunan menggunakan Metode Ferosemen, hal yang sering menjadi kendala adalah ketidakmauan pekerja bangunan untuk bekerja menggunakan metode tersebut. Ketidakmauan tersebut berasal dari rasa takut tidak mau belajar hal baru, tidak mengerti metode tersebut, dan ketidaksesuaian upah yang diberikan. Padahal, pihak Asisten Tenaga Fasilitator Lapangan hingga pihak Yayasan ADRA sudah memberikan contoh cara

pengerjaanya, namun tetap saja pekerja tidak mau melanjutkan pekerjaan. Pada akhirnya hal ini mengakibatkan keterlambatan penyelesaian bangunan dari ketentuan batas waktuyang berlaku. Hal ini tidak berlaku di Kelurahan Oebufu saja, namun terjadi di kelurahan lain. Bahkan di Kelurahan Oesapa Barat, penerima bantuan sudah berkali-kali melakukan pergantian tukang, hal tersebut diakibatkan oleh upah yang tidak cukup serta sulitnya pengerjaan metode tersebut.

Tentunya dengan adanya program BSPP ini, masyarakat sangat terbantu, banyak penerima bantuan yang ditemui merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Asisten TFL maupun TFL. Hal ini dikarenakan rumah yang dibangun dengan bantuan stimulan yang diberikan oleh pemerintah dengan keswadayaan warga membuahkan hasil yang positif. Rumah yang dibangun juga sudah sesuai dengan kaidah struktur yang ada, serta jauh lebih layak dibandingkan dengan rumah penerima bantuan sebelumnya.

Kesuksesan penyelenggaraan program ini dibuktikan dengan dilaksanakan kegiatan Pemasangan Peneng pada Kelurahan Naikolan yang dihadiri pejabat-pejabat Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR seperti Chandra Rudi Parulian Situmorang, S.T., M.T. sebagai Kepala Sub Direktorat Wilayah II, Yublina D. Bunga, S.T., M.T. sebagai Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, dan Dodi Kurniadi ST Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi NTT. Para pejabat yang turun langsung ke lokasi mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan penerima bantuan dengan diberikan cendramata berupa syal bermotif batik khas Pulau Rote. Kegiatan ini membuktikan bahwa Pelaksanaan Program BSPP di Kota Kupang ini berjalan dengan cukup baik dan layak untuk di apresiasi.



Gambar 11. . Pelaksanaan kegiatan Pemasangan Peneng BSPS di rumah penerima bantuan di Kelurahan Naikolan, Kota Kupang, NTT

Masalah umum yang ditemukan dalam pengerjaan kedua metode ini adalah masalah biaya dan pekerja, dengan penghasilan penerima bantuan yang kurang lebih \leq UMR Kota Kupang, pembangunan dapat terhambat akibat kekurangan biaya. Kota ini tercatat oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada tahun 2021 pernah menyentuh suhu sebesar 35°C , tentunya cuaca yang panas sangat mempengaruhi kinerja pekerja terutama pada siang hari. Umumnya pekerja bangunan bekerja pada menjelang sore hingga malam untuk menghindari teriknya sinar matahari. Selain itu,

dengan upah yang minimum, dengan total upah Rp.2.500.000, banyak pekerja yang tidak mau menerima upah pekerjaan sebanyak itu, dampaknya banyak penerima bantuan yang bekerja sendiri dan memanfaatkan tenaga dari tetangga ataupun keluarga yang ada. Sering ditemukan bahwa penerima bantuan melakukan kegiatan yang cukup riskan, seperti menjual asset kekayaan yang dimiliki hingga melakukan peminjaman uang. Tentunya hal ini patut untuk menjadi perhatian bersama dan dapat diberikan solusi lain agar tidak menyusahkan penerima bantuan.

Terdapat keunikan-keunikan yang ditemukan selama melakukan kegiatan pembangunan rumah di kota ini, diantaranya adalah:

- a. Tidak heran jika Kota Kupang mendapatkan julukan Kota Karang dikarenakan batu karang yang ada di kota ini sangat melimpah. Dengan sulitnya mencari batu kali atau batu gunung dikarenakan letak geografis yang berdekatan dengan pantai, penggunaan batu karang

sebagai material fondasi dan tanah urug lebih sering ditemukan di lokasi pembangunan, tidak hanya itu, pemanfaatan batu karang juga digunakan sebagai material utama batako.

b. Disaat melakukan pengawasan ditemukan sebuah penolakan dari penerima bantuan untuk melengkapi struktur atap, hal ini dikarenakan terdapat sebuah mitos dan kepercayaan bahwa komponen struktur atap vertikal atau menghadap kebawah dapat membawa malapetaka, lebih tepatnya mampu mengancam nyawa penghuni dan menyebabkan kematian. Untuk mengatasi solusi ini, akhirnya diberikan saran untuk menggunakan bentuk rangka atap yang lain.

c. Mayoritas material dasar dari rumah tradisional penerima bantuan sebelum dilakukan perbaikan berasal dari kayu bebak gewang, kayu ini memiliki nama latin *Coryphan utan*, tanaman ini hanya akan berbuah dan berbunga sekali dimasa hidupnya. Pohon ini memiliki tinggi rata-rata sebesar 15-20 meter. Pohon palma ini hanya

hidup di sekitara dataran rendah dan sekitar 300 mdpl. (Heyne, K 1987 & Sastroadja, 1981) Dipilihnya tanaman ini dikarenakan tanaman ini lebih murah, kuat, dan mayoritas lebih banyak di lokasi pulau ini.

D. **PENUTUP**

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk magang pada program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka Angkatan 3 di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur didapat beberapa kesimpulan, diantaranya adalah:

a. Program MSIB Kampus Merdeka memberikan kesempatan untuk pesertanya untuk menjadi lebih berkembang dalam kemampuan lunak (*softskills*) dan kemampuan keras (*Hardskills*) serta mampu membuat peserta untuk beradaptasi menghadapi lingkungan baru seperti lingkungan perkantoran dan lingkungan masyarakat. Program ini juga membantu peserta magang berpartisipasi dalam kegiatan sosial dengan

Commented [R8]: Lebih fokus kepada hasil Pengabdian saja. Tidak menjelaskan lagi yang sudah dijelaskan pada hasil.

Buat lebih ringkas dan padat.

tujuan mulia, yaitu mengabdikan kepada masyarakat, membantu masyarakat dalam pembangunan, dan mendukung masyarakat dalam menyelesaikan pembangunan rumah mereka. Program ini diperlukan untuk generasi yang akan datang agar dapat memiliki jiwa integritas, peduli, dan kualitas dalam diri agar menjadi lebih baik dan berbeda

b. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan program yang cukup efektif dan terbilang mampu membantu mengatasi kemiskinan ekstrem di Kota Kupang, hal ini dibuktikan dengan rampungnya pembangunan 76 dari 87 rumah per 31 Desember 2022. Bahkan beberapa rumah sudah dilakukan pemasangan Peneng BSPS. Dengan rampunya pembangunan tersebut, tentunya rumah yang dihuni sudah terjamin pembangunannya serta memenuhi kriteria rumah layak huni. Jika rumah-rumah penerima bantuan tersebut sudah tergolong rumah layak huni, diharapkan kedepannya

penerima bantuan dapat memperbaiki kualitas hidup sehari-hari seperti membersihkan lingkungan didalam rumah maupun diluar rumah, membersihkan sanitasi, membersihkan diri, serta mampu beristirahat di rumah dengan merasa nyaman dan aman. Sehingga pada akhirnya hal tersebut akan mengurangi tingkat kesetresan penerima bantuan dan mampu untuk memberikan lingkungan yang sehat untuk penerima bantuan dan warga sekitarnya. Kebutuhan dalam memperbaiki kondisi rumah yang dulu pun sudah terbantu dengan adanya bantuan dari program ini sehingga penerima bantuan dapat mengerahkan dana yang dimiliki untuk memenuhi akomodasi lain. Dengan demikian, diharapkan setelah ini Kota Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menurunkan persentase kemiskinan ekstrem.

c. Meskipun program ini mampu untuk membantu masyarakat, namun dalam pembangunannya banyak terjadi kendala seperti kurangnya dana pembangunan, hal

tersebut membuat para penerima bantuan untuk melakukan penjualan aset yang mereka miliki dan bahkan tindakan hutang-piutang yang dapat membahayakan sistem keuangan yang dimiliki penerima bantuan kedepannya. Adapun kendala lain yang mengakibatkan pekerjaan pembangunan tertunda ialah: (1) Kurangnya rasa tanggung jawab penerima bantuan dalam pembangunan, (2) Masukan yang tidak dilakukan dari Asisten TFL dan TFL oleh penerima bantuan atau pekerja bangunan akibat merasa pengalaman tukang lebih utama, (3) Cuaca yang panas mengakibatkan seringnya tertunda pembangunan, dan (4) Pembangunan terhenti akibat penerima bantuan dan atau pekerja bangunan mabuk-mabukan hingga bersikap dan berkata kurang menyenangkan kepada Asisten TFL dan TFL.

d. Kekuatan struktur rumah menggunakan Metode Ferosemen adalah sebuah inovasi yang luar biasa, inovasi ini juga terbukti tahan terhadap guncangan gempa dan menjadi salah

satu metode pembangunan alternatif pada program BSPS. Namun sayangnya pekerjaan ini belum tergolong umum dan cukup rumit untuk dikerjakan. Walaupun dikatakan lebih murah dari pekerjaan rumah konvensional banyak ditemukan penolakan, pasalnya pengerjaan pemasangan ram-ram kawat dapat memakan waktu yang cukup lama, hal ini akan menyebabkan pembangunan rumah tidak mencapai target pada tanggal yang sudah ditentukan. Selain itu, masih banyak tukang atau pekerja bangunan yang tidak mengerti metode ini walaupun sudah dilakukan sosialisasi dan pendampingan, terdapat beberapa kasus yang bahwa pekerja tidak mau bekerja menggunakan metode ini dikarenakan pelaksanaan yang rumit dan tidak biasa. Tidak hanya itu, penerima bantuan juga sempat kebingungan lantaran sudah mengganti-mengganti tukang untuk mengerjakan pembangunan rumah tersebut dengan alasan tukang menolak dibayar dengan upah Rp. 2.500.000. Hal ini terbukti dengan 11 rumah

penerima bantuan yang menerima perkuatan dengan menggunakan Metode Ferosemen tidak selesai per 31 Desember 2022.

Dari kesimpulan tersebut, peserta magang memberikan beberapa usulan agar dapat digunakan dan menjadi suatu solusi di kegiatan selanjutnya, yaitu:

a. Lakukan penambahan dana bagi pekerja bangunan yang mengerjakan perkuatan menggunakan Metode Ferosemen agar nominal yang didapat lebih besar dari pekerja bangunan yang mengerjakan Metode Konvensional

b. Disarankan untuk pihak yang melakukan pengambilan keputusan dan pihak yang melakukan verifikasi agar tidak melakukan pemaksaan terhadap calon penerima bantuan yang tidak mampu atau melakukan penolakan.

Padahal tercatat pada 2.3 Persyaratan Penerima Bantuan, Poin 6, Petunjuk Teknis, Surat Edaran Nomor 3/SE/Dr/2021 Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa syarat

penerima bantuan mendapatkan bantuan ini adalah bersedia dan mampu untuk berswadaya.

c. Menjadi suatu kota yang memiliki keberagaman adat dan budaya merupakan anugerah terbesar yang dimiliki oleh suatu daerah. Ditambah dengan keunikan yang ada serta alam yang indah. Terlepas dari hal-hal tersebut, Kota Kupang masih perlu banyak melakukan perubahan. Terutama dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, perlu banyaknya program dari pemerintah yang mampu mendukung pembangunan infrastruktur di kota ini agar masyarakat kota ini memiliki pemukiman yang layak, kualitas pendidikan yang mumpuni, akses kesehatan yang terjangkau, serta lingkungan yang bersih dan sehat.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan dan jurnal ini tidak akan bisa ada jika tanpa pihak-pihak yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Diharapkan jurnal ini mampu untuk membantu calon peserta magang di

program MSIB Kampus Merdeka ataupun pihak lain yang membutuhkan jurnal ini sebagai wawasan, panduan, dan ilmu pengetahuan. Dengan kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa berterima kasih kepada: (1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia dan pihak program Magang atau Studi Independen Bersertifikat Angkatan 3 Kampus Merdeka, (2) Direktorat Jendral Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nusa Tenggara Timur, (3) Koordinator dan seluruh Tenaga Fasilitator Lapangan Kota Kupang 2022, (4) Mentor di lokasi kegiatan MSIB Angkatan 3, (5) Seluruh dosen dan staff yang mendukung penulis di Universitas Kristen Maranatha, (6) Seluruh peserta magang program MSIB Kampus Merdeka Angkatan 3 di Direktorat Jendral Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nusa Tenggara

F. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standarisasi Nasional. (2019). *Persyaratan Beton Struktural untuk bangunan Gedung dan Penjelasan (ACI 318M-14 dan ACI 318RM-14, MOD) SNI 2847:2019*. Jakarta
- Badan Standarisasi Nasional. (2019). *Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung*. SNI 1726:2019. Jakarta
- Boen, T. (2015) *Membangun Rumah Tembakan Tahan Gempa dengan Balutan Lapisan Ferosemen*. Jakarta, Indonesia: CSI Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perumahan Kemnterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Surat Edaran Nomor 3/SE/Dr./2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perumahan Kemnterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan*

Commented [R9]: Minim teori, sementara penjelasan terlalu panjang

- Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403)*. Jakarta
- Heyne, K. (1987). *Tumbuhan Berguna Indonesia*. Jakarta: Balitbang Kehutanan
- Kuncoro, Mudrajad. (1997). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Kurniasih dkk. (2010). *Sehat dan Bugar Berkat Gizi Seimbang*. Jakarta: Gramedia.
- Tallar, R.Y. (2022) *Pengantar Ilmu Lingkungan dalam Teknik Sipil*. Bandung: CV. Zahir Publishing
- Yudohusodo, Siswono. (1991), *Rumah untuk Seluruh Rakyat*. Indonesia: Barakerta

PENINGKATAN KUALITAS RUMAH MASYARAKAT MISKIN EKSTREM OLEH PESERTA MSIB KAMPUS MERDEKA MELALUI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR

Prabu Mandvi Hafiz Anjar Suhendar¹, Yosafat Aji Pranata^{2*}

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia ^{1,2}

*Penulis Korespondensi : yosafat.ap@gmail.com

Abstract

One of the primary needs of human beings is building and owning a home. A home has an important role in life. A home is also a beginning of a civilization, we also can learn many things from our home. Therefore, without a home, human beings will suffer and will not survive. A home needs to fulfill the livable criteria so the resident can feel safe and comfortable while living inside their house. However, not all houses fulfill the livable criteria, one of the major factors is extreme poverty. In Indonesia, extreme poverty can be caused by many factors, one of them is low income. Extreme poverty can have a major impact on the condition of houses. One of the poorest provinces in Indonesia is East Nusa Tenggara, with a percentage of poverty in cities and villages at 20.50%, this number was obtained by the Indonesia Central Bureau of Statistics in March 2022. This journal aims to deliver the contribution of Maranatha Christian University students who became an intern at MSIB Kampus Merdeka Batch 3 at the Directorate General of Human Settlement, Ministry of Public Works and Housing (PUPR) with the Self-Help Housing Stimulant Program (BSPS) in Kupang City, East Nusa Tenggara.

Keywords: Extreme Poverty, Kupang City, Livable Criteria, Self-Help Housing Stimulant Program (BSPS)

Abstrak

Kebutuhan primer manusia salah satunya adalah membangun dan memiliki tempat tinggal. Rumah memiliki peran penting dalam kehidupan. Rumah juga menjadi sebuah awal peradaban dimana dari rumah kita dapat belajar banyak hal. Sehingga, tanpa adanya tempat tinggal manusia akan mengalami kesulitan melakukan kegiatan dan bertahan hidup. Sebuah tempat tinggal juga harus memenuhi kriteria layak huni agar penghuni dapat merasa aman dan nyaman saat didalam rumah tersebut. Namun faktanya tidak semua rumah masuk kedalam kategori layak huni, salah satu faktor utamanya diakibatkan oleh kemiskinan ekstrem. Di Indonesia, kemiskinan ekstrem mampu diakibatkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah. Kemiskinan ekstrem ini juga dapat berpengaruh besar terhadap kondisi tempat tinggal. Salah satu provinsi termiskin di Indonesia adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase kemiskinan perkotaan dan perdesaan dengan jumlah sebesar 20.50%. hasil ini diperoleh oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2022. Jurnal ini memiliki tujuan untuk menyampaikan hasil kontribusi dari mahasiswa Universitas Kristen Maranatha yang menjadi seorang peserta magang di MSIB Kampus Merdeka Angkatan 3 pada Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam mengatasi kemiskinan ekstrem bidang perumahan masyarakat dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Kata kunci: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kemiskinan Ektrem, Kota Kupang, Magang & Studi Independen Bersertifikat (MSIB).

Commented [R1]: Judul dipersingkat lagi agar mudah dipahami

Commented [PM2R1]: Judul sudah dipersingkat dan tidak dapat dipersingkat lagi

A. PENDAHULUAN

Menjadi seorang mahasiswa merupakan tanggung jawab yang besar dan harus menjadi pribadi yang aktif dan mandiri dalam kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus. Kegiatan yang dilakukan tentunya merupakan kegiatan positif yang dapat mendukung meningkatkan kemampuan, baik itu *hardskills* ataupun *softskills* mahasiswa. Tentunya dalam hal ini peran instansi baik dari pihak sekolah maupun kampus dan sebagainya, perlu mendukung secara penuh dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki para pelajarnya untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Universitas Kristen Maranatha juga turut mengambil peran dalam membantu mengembangkan kemampuan akademik maupun nonakademik agar mendukung negara ini menjadi negara maju. Salah satu langkah yang didukung adalah mempersiapkan mahasiswa dan mahasiswinya untuk mengikuti program Magang & Studi Independen Bersertifikat (MSIB), Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu gagasan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Program ini memiliki kebijakan dan keuntungan yang berbeda dari program magang dari biasanya. Program ini juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa dan mahasiswi agar dapat melaksanakan kegiatan di luar program studi dan mendapatkan pengalaman untuk mempraktikkan ilmu yang didapat dalam lingkungan yang nyata, selain itu program ini juga mendukung mahasiswa dan mahasiswi dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan seperti bantuan Bantuan Biaya Hidup (BBH), fasilitas biaya perjalanan dari tempat tinggal ke lokasi magang, dan juga Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Tujuan program ini juga bisa dijadikan sebuah alternatif pengganti dari mata kuliah Magang atau Kerja Praktik (KP) atau juga sebagai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Salah satu mitra yang menyediakan lowongan program magang dalam MSIB Angkatan 3 pada Tahun 2022 adalah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Kementerian Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam pembangunan di bidang konstruksi. Kementerian PUPR memfokuskan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tertera pada Peraturan Presiden Pasal 4 Nomor 27 Tahun 2020.

Kegiatan magang yang mulai dilaksanakan pada 18 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023 atau kurang lebih 5 bulan jika terhitung pendaftaran yang merangkul banyak pekerjaan, Adapun posisi yang diberikan adalah Pendamping Fasilitator Teknik kegiatan BSPS dan Pendamping Fasilitator Pemberdayaan Kegiatan BSPS.

Sebagai asisten dari Tenaga Fasilitator Lapangan tentunya tugas yang didapat juga tidak jauh berbeda, namun salah satu tugas utama dan paling penting adalah melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang berlangsung selama periode yang ada. Sebagai mahasiswa magang tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah. Berperan dalam membantu menjalankan sebuah program dari pemerintah dengan tujuan yang mulia, yaitu mengatasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) bukanlah sebuah hal yang mudah, pasalnya dalam pelaksanaannya, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi. Terutama saat menghadapi masyarakat dengan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, serta memiliki perbedaan latar belakang dan bahasa.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang memiliki pulau lebih banyak dari provinsi lain, terdapat 1.192 pulau dalam provinsi ini. Tentunya dari sekian banyak pulau tersebut, pemerintah terus berupaya melakukan perhitungan yang matang serta pembangunan yang merata agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di provinsi ini. Salah satu fokus pemerintah dalam pembangunan adalah pembangunan rumah tinggal. Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia Periode 2019-2024 menyampaikan sebuah instruksi bahwa Kementerian PUPR perlu mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, salah satunya dengan melalui perbaikan rumah. Sehingga, sejak 2021 hingga 2024 mendatang, pemerintah berupaya mencapai target, yaitu mengatasi kemiskinan ekstrem di 514 Kabupaten dan Kota agar persentase kemiskinan ekstrem mencapai dibawah 1%. Hasil dari instruksi tersebut, melalui Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, memilih untuk memfokuskan beberapa aspek melalui programnya, diantaranya adalah percepatan penurunan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan kualitas RTLH, penanganan stunting dan penderita TBC, dan penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh terintegrasi.

Kata miskin memiliki arti bahwa miskin adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 1997). Sementara itu menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations* (UN) pada tahun 1996 menjelaskan bahwa Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (*United Nations*, 1996). Tingkat kemiskinan ekstrem dapat diukur menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antarnegara dan antarwaktu. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki pengasihan di bawah US\$1.9 PPP (*Purchasing Power Parity*)/paritas daya beli, atau setara dengan Rp29.378 (30 Desember 2022). Lingkungan yang

tidak sehat tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan manusia, terutama seorang anak. Masa balita merupakan sebuah periode yang sangat peka terhadap lingkungan sehingga diperlukan perhatian lebih terutama kecukupan gizinya. Salah satu yang menjadi prioritas pemberantasan oleh pemerintah adalah kondisi stunting. Dikutip dari laman web Kementerian Kesehatan, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Diharapkan dengan adanya perbaikan lingkungan hidup, akan memperbaiki kesehatan dari penghuninya terutama generasi penerus bangsa.

Kota Kupang memiliki luas wilayah sebesar **180.3Km²** atau sekitar 18.030 hektar. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di Kota Kupang (2020), kota ini memiliki **442.758.000** jiwa penduduk, dengan tingkat persentase kemiskinan sebesar **8.61%** per tahun 2022. Tentunya angka 8.61% bukanlah angka yang baik, ditambah lagi dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) provinsi ini berjumlah **Rp 1.950.00** yang sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan UMP Kota Jakarta sebesar **Rp 4.641.854**. Hal ini masih menjadi target pemerintah Kota Kupang untuk menangani kemiskinan ekstrem, ditambah lagi dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki tingkat kemiskinan provinsi ini sebanyak **20.05%** dari **1.131.620** penduduk.

Tentunya hal-hal tersebut terkoneksi dan saling berhubungan, perlu adanya sebuah program dari pemerintah yang mampu membantu mengurangi masalah tersebut. Maka dari itu salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia, pemerintah memberikan program-program yang inovatif dan terintegrasi, salah satunya adalah Program BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Terdapat kata “stimulan” dan “swadaya” yang kurang umum bagi masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, stimulan adalah sesuatu yang menjadi cambuk bagi peningkatan prestasi atau semangat bekerja, atau pendorong dan perangsang. Untuk kata “swadaya” adalah kekuatan tenaga sendiri. Sehingga arti dalam garis bahasa yang ada bahwa program ini merupakan sebuah pendorong bagi masyarakat untuk dapat mengerjakan pembangunan rumah mereka dengan tenaga sendiri, uang sendiri, atau bantuan orang lain. Penyelenggaraan program ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak dasar rakyat di Indonesia untuk bertempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat.

Pemerintah membentuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan atau disingkat BP2P yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020. BP2P merupakan Unit Pelaksana Teknis Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan khususnya Direktorat Rumah Swadaya yang termasuk BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. BSPS memiliki sebuah tujuan yang

terfokus dalam beberapa aspek, aspek-aspek. Hal ini merupakan sebuah poin penting yang perlu dituju dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, menjalankan instruksi Presiden, dan memenuhi tujuan-tujuan dalam pembangunan berkelanjutan atau Sustainable *Development Goals* yang ditentukan oleh *United Nations*. Dari ke tujuh belas tujuan, program ini terlihat berfokus menangani 3 tujuan, yaitu: (a) Tujuan 1, *No Poverty* atau Tanpa Kemiskinan, (b) Tujuan 2, *Good Health and Well Being* atau Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (c) *Clean Water and Sanitation* atau Air Bersih dan Sanitasi Layak.

Sebuah program tentunya memiliki dasar hukum agar diperlancar segala urusan dan tujuannya. Berdasarkan Petunjuk Teknis, Surat Edaran Nomor 3/SE/Dr/2021 Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan judul Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS sendiri memiliki 8 dasar hukum, salah satunya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403).

Dari dasar-dasar hukum tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah dana untuk kebutuhan program ini, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dana yang diberikan oleh pemerintah untuk satu penerima bantuan adalah sebesar Rp20.000.000, dengan rincian, Rp 17.500.000 untuk material dan biaya lainnya dan Rp 2.500.000 untuk upah tukang. Dana tersebut digunakan sebagai stimulan untuk warga dalam membangun dan memperbaiki kondisi rumah. Dana tersebut berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B. METODE

Terdapat dua metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian ini, yang pertama adalah metode penerapan program BSPS. Penerapan program ini perlu beberapa tahapan sesuai pada Petunjuk Teknis, Surat Edaran Nomor 3/SE/Dr/2021 Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan judul Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yaitu melakukan persiapan kegiatan seperti melakukan pengusulan lokasi, lalu melakukan verifikasi/penilaian usulan, penetapan lokasi, seleksi/pengolahan data, dan penyampaian daftar calon penerima bantuan, perencanaan kegiatan, penyiapan masyarakat, pelaksanaan kegiatan, dan pemanfaatan rumah atau penghunian dan pemeliharaan, dan pembinaan rumah penerima bantuan. Metode pelaksanaan yang kedua adalah, melakukan beberapa metode pelaporan lain seperti pengambilan dokumentasi, penyusunan bahan presentasi akhir, menyusun laporan mingguan, dan menyusun laporan akhir magang di Kampus Merdeka.

Commented [R3]: Bagian ini lebih di ringkas lagi agar mudah dipahami, Silahkan ikuti penulisan template jurnal apa saja yang merupakan bagian dari metode.

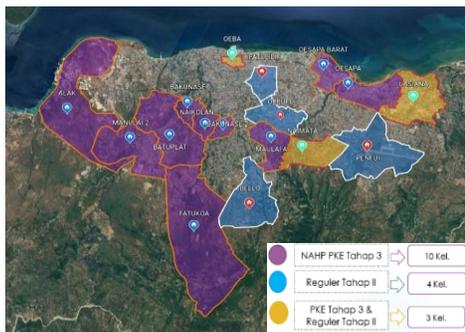
Commented [PM4R3]: Sudah diperingkas dan diperbaiki

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pemilihan penerima bantuan program BSPTS pada tahun anggaran 2022, di Kota Kupang terdapat 87 penerima bantuan yang lolos dalam tahap verifikasi. 87 penerima bantuan tersebut tersebar di 17 kelurahan dari 51 kelurahan yang ada di Kota Kupang. Di dalam kota ini terdapat dua jenis sumber dana dari bantuan yang ada, yaitu Alokasi dana program Reguler dan program NAHP atau *National Affordable Housing Program*.

Tabel 1. Jumlah Penerima Bantuan BSPTS di Kota Kupang, NTT, Indonesia (DJP, Kementerian PUPR, NTT, 2022)

Alokasi	Verifikasi	Eligible	SK PPK
NAHP PKE Tahap 3 Reguler Tahap II	650	136	66
	21	21	21
Total			87



Gambar 1. Peta Sebaran Penerima Bantuan BSPTS per Kelurahan di Kota Kupang, NTT

Kegiatan yang paling krusial dalam pengabdian kepada Masyarakat/magang ini adalah melakukan pengawasan, hal ini sangat penting dalam kegiatan konstruksi. Pengawasan pembangunan diperlukan untuk mengisi data pada laporan dan formulir yang tersedia. Pada kegiatan pengawasan terdapat beberapa hal yang ditemukan oleh peserta MSIB dan para pengawas lain/TFL, diantaranya yang paling sering adalah kesalahan dalam pembangunan konstruksi struktur rumah.



Gambar 2. Kegiatan Diskusi bersama Warga Penerima Bantuan BSPTS dan Kegiatan Pengawasan Pembangunan. (Koleksi Pribadi)

Menurut Siswono Yudohusodo (Rumah Untuk Seluruh Rakyat, 1991: 432), rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sebuah sarana pembinaan keluarga. Sehingga tanpa adanya tempat tinggal manusia akan mengalami kesulitan melakukan kegiatan, bertahan hidup, dan melanjutkan kegiatan kesehariannya. Sehingga kondisi sebuah rumah harus layak huni untuk pemiliknya.

Hasil dari temuan di Kota Kupang, terdapat beberapa kondisi rumah penerima bantuan sudah sangat tidak layak untuk dihuni, terdapat temuan saat melakukan pengawasan bahwa banyak rumah yang hampir runtuh dikarenakan material rumah penerima bantuan sebelumnya sudah masuk kategori tidak layak pakai, data tersebut didapat saat melakukan penilaian kondisi rumah oleh pihak-pihak pemangku kebijakan. Diketahui bahwa mayoritas material dasar dari rumah tradisional penerima bantuan sebelum dilakukan perbaikan berasal dari kayu bebak gawang, kayu ini memiliki nama latin *Coryphan utan*, tanaman ini hanya akan berbuah dan berbunga sekali dimasa hidupnya. Pohon ini memiliki tinggi rata-rata sebesar 15-20 meter. Pohon palma ini hanya hidup di sekitar dataran rendah dan sekitar 300 mdpl. (Heyne, K 1987 & Sastroadja, 1981)

Dalam kegiatan pengawasan, terdapat beberapa kesalahan-kesalahan struktural dan nonstruktural yang ditemukan, seperti kurangnya jumlah tulangan untuk komponen struktur hal ini dikarenakan tidak mengikuti anjuran standar penulangan kolom/ringbalk/sloof/balok yang tertera pada aturan SNI, PUPR maupun aturan Internasional seperti ACI 318 M-11 Pasal 10.9.2 yang menyatakan bahwa "menyatakan bahwa minimal harus dipasang empat buah tulangan memanjang untuk kolom dengan sengkang persegi atau lingkaran, minimal tiga buah untuk kolom berbentuk segitiga, serta minimal enam buah untuk kolom dengan sengkang spiral" (Badan Standardisasi Nasional, 2019). Terdapat juga temuan bahwa rumah penerima bantuan tidak memiliki ventilasi dan pintu pada bagian kamar, dapur, dan kamar mandi. Mengakibatkan bau yang tidak sedap didalam rumah, hal ini melanggar aturan pada Petunjuk Teknis Program

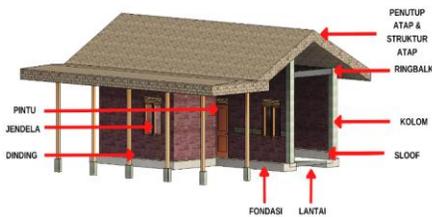
Commented [R5]: Saran, peletakan foto dan tabel mohon disesuaikan dengan template jurnal

1. Usahakan tidak ada foto di dalam tabel
2. Masukkan foto yang penting dan mewakili kegiatan Pengabdian
3. Ikuti metode penelitian di dalam penyusunan pembahasan sehingga lebih ringkas
4. Penjelasan terlalu lebar dan masih terdapat unsur-unsur yang diulang berkali-kali.

Silahkan perbaiki sesuai saran.

Commented [PM6R5]:

BSPS yang seharusnya adalah penghawaan suatu rumah diperlukan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai ruangan. (Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021)



Gambar 3. Komponen Struktural dan Nonstruktural sebuah Rumah (Koleksi Pribadi)

Terdapat dua tipe perbaikan yang ditawarkan oleh pemerintah dan dapat dipilih oleh penerima bantuan untuk perbaikan rumah, yang pertama adalah metode konvensional dan yang kedua adalah metode perkuatan ferosemen.

Perlu diketahui bahwa pengerjaan dan penentuan komponen yang digunakan untuk membangun sebuah rumah yang benar harus sesuai dengan aturan yang ada. Seluruh rumah perlu memiliki komponen-komponen struktural maupun nonstruktural yang tertera pada Gambar 2 dan memenuhi penilaian yang ada. Penilaian ini berbasis pada beberapa Buku Aturan atau Standar Nasional Indonesia (SNI), diantaranya adalah menggunakan SNI 2847:2019 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung dan Penjelasan, SNI 1727:2020 tentang Beban Desain Minimum dan Kriteria Terkait untuk Bangunan Gedung dan Struktur lain, dan SNI itu adalah SNI 1726:2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung. Bahan perkuatan menggunakan metode konvensional biasanya menggunakan komponen struktural seperti kolom beton bertulang, balok induk bertulang, dan ringbalk bertulang. Tulangan yang digunakan berjenis baja yang telah memiliki label SNI.



Gambar 4. Pelaksanaan Metode Ferosemen bersama pihak Yayasan Adra (Koleksi Pribadi)

Untuk metode ferosemen sendiri memanfaatkan beberapa bahan yang berbeda dengan Metode Konvensional, bahan-bahan tersebut adalah: (1) Paku paying/paku seng, (2) Paku beton, (3) Ram kawat dengan $\pm \geq \emptyset 1\text{mm} - 2,5 \times 2,5\text{cm}$ dan lebar 100 cm, (4) kawat ikat/kawat bendrat, (5) Semen berlabel SNI, (6) Pasir bersih, (7) Botol kecap atau botol saus dengan moncong yang panjang, (8) gunting kawat, (9) ember, sendok semen, dan roskam, (10) Palu, (11) Bor atau alat pengganti bor. (Teddy Boen, 2015)

Setelah melakukan kegiatan dan rekapitulasi data selama beberapa bulan hingga Desember 2022, didapatkan hasil yang belum memuaskan. Hal ini dikarenakan masih terdapat setidaknya 11 dari 87 rumah yang belum selesai per 31 Desember 2022.

Tabel 2. Persentase Status Pembangunan Program BSPS di Kota Kupang, NTT, Indonesia (DJP, Kementerian PUPR, NTT, 2022)

Metode Perbaikan	Jumlah Rumah	Persentase Status Pembangunan
Konvensional	78	85-100%
Ferosemen	11	30-60%

Dari hasil pengawasan, terdapat hasil dimana penerima bantuan yang menggunakan metode perbaikan dengan menggunakan metode ferosemen tidak sanggup selesai hingga 31 Desember 2022. Selama pembangunan menggunakan Metode Ferosemen, hal yang sering menjadi kendala adalah ketidakmauan pekerja bangunan untuk bekerja menggunakan metode tersebut. Ketidakmauan tersebut berasal dari rasa untuk tidak mau belajar hal baru, tidak mengerti metode tersebut, dan ketidaksesuaian upah yang diberikan. Padahal, pihak Asisten Tenaga Fasilitator Lapangan hingga pihak Yayasan ADRA Indonesia sudah memberikan contoh cara pengerjaannya, namun tetap saja pekerja tidak mau melanjutkan pekerjaan.

Masalah umum yang ditemukan dalam pengerjaan kedua metode ini adalah masalah biaya dan pekerja, dengan penghasilan penerima bantuan yang kurang lebih \leq UMR Kota Kupang, pembangunan dapat terhambat akibat kekurangan biaya. Kota ini tercatat oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada tahun 2021 pernah menyentuh suhu sebesar 35°C, tentunya cuaca yang panas sangat mempengaruhi kinerja pekerja terutama pada siang hari. Selain itu, dengan upah yang minimum, dengan total upah Rp.2.500.000, banyak pekerja yang tidak mau menerima upah pekerjaan sebanyak itu, dampaknya banyak penerima bantuan yang bekerja sendiri dan memanfaatkan tenaga dari tetangga ataupun keluarga yang ada. Sering ditemukan bahwa penerima bantuan melakukan kegiatan yang cukup riskan, seperti menjual aset kekayaan yang dimiliki

hingga melakukan peminjaman uang. Tentunya hal ini patut untuk menjadi perhatian bersama dan dapat diberikan solusi lain agar tidak menyusahkan penerima bantuan.



Gambar 3. Kegiatan Pemasangan Peneng BSPS bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Daerah Kota Kupang (Koleksi Pribadi)

Kegiatan pengabdian lain selain melakukan pengawasan adalah melakukan Pengukuran komponen struktural dan nonstruktural di lapangan, pengambilan dokumentasi, menggambar teknis menggunakan perangkat lunak *AutoCAD*, mendesain bangunan menggunakan perangkat lunak *Revit* dan *Lumion 9*, dan melakukan kegiatan pemasangan peneng BSPS.

D. KESIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk magang pada program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka Angkatan 3 di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur didapat beberapa kesimpulan, diantaranya adalah:

- a. Program MSIB Kampus Merdeka yang merupakan regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 dan 18 memberikan kesempatan untuk pesertanya untuk menjadi lebih berkembang dalam kemampuan lunak (*softskills*) dan kemampuan keras (*hardskills*) serta mampu membuat peserta untuk beradaptasi menghadapi lingkungan baru seperti lingkungan perkantoran dan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat.
- b. Kegiatan yang dilakukan peserta program MSIB Kampus Merdeka dengan membantu menerapkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur bersama Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Nusa Tenggara Timur berjalan cukup efektif hal ini dibuktikan dengan rampungnya pembangunan & perbaikan 76 dari 87 rumah per 31 Desember 2022.
- c. Terdapat 11 rumah yang menjalankan perbaikan menggunakan metode ferosemen terhambat selesai

hingga 31 Desember 2022 atau akhir masa anggaran. Diantaranya adalah (1) Kurangnya rasa tanggung jawab penerima bantuan dalam pembangunan, (2) Tidak paham pengerjaan Pembangunan menggunakan metode baru dan sulitnya menerapkan metode baru (3) Pembangunan terhenti akibat penerima bantuan dan atau pekerja bangunan mabuk-mabukan hingga bersikap dan berkata kurang menyenangkan kepada Asisten TFL dan TFL.

- d. Terdapat temuan kesalahan struktural yang tidak sesuai dengan SNI 2847:2019 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung dan Penjelasan, SNI 1727:2020 tentang Beban Desain Minimum dan Kriteria Terkait untuk Bangunan Gedung dan Struktur lain, dan SNI itu adalah SNI 1726:2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung, seperti pemasangan tulangan pokok memanjang yang kurang, pemasangan sengkang yang tidak kuat, dan pengecoran sloof yang tidak simetris. Hal ini menyimpulkan bahwa perlu adanya edukasi dasar mengenai pemasangan tulangan yang benar.
- e. Terdapat temuan pada rumah lama dari penerima bantuan yang yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis, Surat Edaran Nomor 3/SE/Dr/2021 Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, seperti temuan sanitasi yang tidak layak dan sulit dijangkau, *septictank* yang tidak dibersihkan selamat 5 tahun, serta penghawaan yang kurang dari 5%. Hal ini membuktikan bahwa kondisi rumah lama dari penerima bantuan tidak layak untuk dihuni dan perlu diperbaiki.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan dan jurnal ini tidak akan bisa ada jika tanpa pihak-pihak yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Diharapkan jurnal ini mampu untuk membantu calon peserta magang di program MSIB Kampus Merdeka ataupun pihak lain yang membutuhkan jurnal ini sebagai wawasan, panduan, dan ilmu pengetahuan. Dengan kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa berterima kasih kepada: (1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia dan pihak program Magang atau Studi Independen Bersertifikat Angkatan 3 Kampus Merdeka, (2) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nusa Tenggara Timur, (3) Beberapa pihak dari Yayasan ADRA Indonesia, (4) Koordinator dan seluruh Tenaga Fasilitator Lapangan Kota Kupang 2022, (5) Mentor di lokasi kegiatan MSIB Angkatan 3, (6) Seluruh dosen dan staff yang mendukung penulis di Universitas Kristen Maranatha, (7) Seluruh peserta magang program MSIB Kampus Merdeka Angkatan 3 di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nusa Tenggara

F. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional. (2019). *Persyaratan Beton Struktural untuk bangunan Gedung dan Penjelasan (ACI 318M-14 dan ACI 318RM-14, MOD) SNI 2847:2019*. Jakarta
- Badan Standardisasi Nasional. (2019). *Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung*. SNI 1726:2019. Jakarta
- Boen, T. (2015) *Membangun Rumah Tembokan Tahan Gempa dengan Balutan Lapisan Ferosemen*. Jakarta, Indonesia: CSI Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Surat Edaran Nomor 3/SE/Dr./2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403)*. Jakarta
- Heyne, K. (1987). *Tumbuhan Berguna Indonesia*. Jakarta: Balitbang Kehutanan
- Kuncoro, Mudrajad. (1997). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Tallar, R.Y. (2022) *Pengantar Ilmu Lingkungan dalam Teknik Sipil*. Bandung: CV. Zahir Publishing
- Yudohusodo, Siswono. (1991), *Rumah untuk Seluruh Rakyat*. Indonesia: Barakerta

Commented [R7]: Minim teori, sementara penjelasan terlalu panjang

Commented [PM8R7]: Sudah diperbaiki. Artikel tidak banyak teori dikarenakan artikel merupakan laporan pengabdian masyarakat, sehingga lebih banyak praktik dan penjelasan.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

Jl. Dr. Cipto - Lontar No. 1 Semarang - Indonesia Telp. (024) 8451279, 8451824 Faks. 8451279
Email : lppmupgrismg@yahoo.co.id Website : lppm.upgrismg.ac.id

Nomor : 09/E-DIMAS/LPPM-UPGRIS/VII/2023

17 Juli 2023

Lamp : -

Perihal : *Permohonan Pembayaran Artikel
Jurnal E-Dimas*

Yth.

Penulis Artikel E-Dimas
di Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa artikel jurnal E-DIMAS Volume 14 Nomor 3 Bulan September 2023 akan segera kami terbitkan, untuk itu mohon Bapak/Ibu untuk segera menyelesaikan administrasi pembayaran sebesar Rp. 400.000,- paling lambat tanggal **25 September 2023** ke Rekening Bank Jateng atas nama Jurnal E Dimas dengan nomor : 2-021-22827-6. Apabila Bapak/Ibu menginginkan jurnal dalam bentuk *hardcopy* dikenakan tambahan biaya Rp 100.000/ekslemplar.

Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Bapak/Ibu tidak melakukan pembayaran, artikel Bapak/Ibu tidak akan dimuat jurnal E-DIMAS Volume 14 Nomor 3 Bulan September 2023.

Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Chief Editor Edimas,



Dr. Rasiman, M.Pd
NIP.195602181986031001

Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Ekstrim oleh Peserta MSIB Kampus Merdeka Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Prabu Mandvi Hafiz Anjar Suhendar¹, Yosafat Aji Pranata²

^{1,2}Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia

²yosafat.ap@gmail.com

Received: 28 Januari 2023; Revised: 31 Agustus 2023; Accepted: 21 September 2023

Abstract

One of the primary needs of human beings is building and owning a home. A home has an important role in life. A home is also a beginning of a civilization, we also can learn many things from our home. Therefore, without a home, human beings will suffer and will not survive. A home needs to fulfill the livable criteria so the resident can feel safe and comfortable while living inside their house. However, not all houses fulfill the livable criteria, one of the major factors is extreme poverty. In Indonesia, extreme poverty can be caused by many factors, one of them is low income. Extreme poverty can have a major impact on the condition of houses. One of the poorest provinces in Indonesia is East Nusa Tenggara, with a percentage of poverty in cities and villages at 20.50%, this number was obtained by the Indonesia Central Bureau of Statistics in March 2022. This journal aims to deliver the contribution of Maranatha Christian University students who became an intern at MSIB Kampus Merdeka Batch 3 at the Directorate General of Human Settlement, Ministry of Public Works and Housing (PUPR) with the Self-Help Housing Stimulant Program (BSPS) in Kupang City, East Nusa Tenggara.

Keywords: *extreme poverty; kupang city; livable criteria; self-help housing stimulant program (BSPS)*

Abstrak

Kebutuhan primer manusia salah satunya adalah membangun dan memiliki tempat tinggal. Rumah memiliki peran penting dalam kehidupan. Rumah juga menjadi sebuah awal peradaban dimana dari rumah kita dapat belajar banyak hal. Sehingga, tanpa adanya tempat tinggal manusia akan mengalami kesulitan melakukan kegiatan dan bertahan hidup. Sebuah tempat tinggal juga harus memenuhi kriteria layak huni agar penghuni dapat merasa aman dan nyaman saat didalam rumah tersebut. Namun faktanya tidak semua rumah masuk kedalam kategori layak huni, salah satu faktor utamanya diakibatkan oleh kemiskinan ekstrim. Di Indonesia, kemiskinan ekstrim mampu diakibatkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah. Kemiskinan ekstrim ini juga dapat berpengaruh besar terhadap kondisi tempat tinggal. Salah satu provinsi termiskin di Indonesia adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase kemiskinan perkotaan dan perdesaan dengan jumlah sebesar 20.50%. hasil ini diperoleh oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2022. Jurnal ini memiliki tujuan untuk menyampaikan hasil kontribusi dari mahasiswa Universitas Kristen Maranatha yang menjadi seorang peserta magang di MSIB Kampus Merdeka Angkatan 3 pada Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam mengatasi kemiskinan ekstrim bidang perumahan masyarakat dengan

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Kata Kunci: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); kemiskinan ekstrim; Kota Kupang; Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)

A. PENDAHULUAN

Menjadi seorang mahasiswa merupakan tanggung jawab yang besar dan harus menjadi pribadi yang aktif dan mandiri dalam kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus. Kegiatan yang dilakukan tentunya merupakan kegiatan positif yang dapat mendukung meningkatkan kemampuan, baik itu *hardskills* ataupun *softskills* mahasiswa. Tentunya dalam hal ini peran instansi baik dari pihak sekolah maupun kampus dan sebagainya, perlu mendukung secara penuh dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki para pelajarnya untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Universitas Kristen Maranatha juga turut mengambil peran dalam membantu mengembangkan kemampuan akademik maupun nonakademik agar mendukung negara ini menjadi negara maju. Salah satu langkah yang didukung adalah mempersiapkan mahasiswa dan mahasiswinya untuk mengikuti program Magang & Studi Independen Bersertifikat (MSIB), Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu gagasan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Program ini memiliki kebijakan dan keuntungan yang berbeda dari program magang dari biasanya. Program ini juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa dan mahasiswi agar dapat melaksanakan kegiatan di luar program studi dan mendapatkan pengalaman untuk mempraktikkan ilmu yang didapat dalam lingkungan yang nyata, selain itu program ini juga mendukung mahasiswa dan mahasiswi dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan seperti bantuan Bantuan Biaya Hidup (BBH), fasilitas biaya perjalanan dari tempat tinggal ke lokasi magang, dan juga Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Tujuan program ini juga bisa dijadikan sebuah alternatif pengganti dari mata kuliah Magang atau Kerja Praktik (KP) atau juga sebagai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Salah satu mitra yang menyediakan lowongan program magang dalam MSIB Angkatan 3 pada Tahun 2022 adalah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Kementerian Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam pembangunan di bidang konstruksi. Kementerian PUPR memfokuskan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tertera pada Peraturan Presiden Pasal 4 Nomor 27 Tahun 2020.

Kegiatan magang yang mulai dilaksanakan pada 18 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023 atau kurang lebih 5 bulan jika terhitung pendaftaran yang merangkul banyak pekerjaan, Adapun posisi yang diberikan adalah Pendamping Fasilitator Teknik kegiatan BSPS dan Pendamping Fasilitator Pemberdayaan Kegiatan BSPS.

Sebagai asisten dari Tenaga Fasilitator Lapangan tentunya tugas yang didapat juga tidak jauh berbeda, namun salah satu tugas utama dan paling penting adalah melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang berlangsung selama periode yang ada. Sebagai mahasiswa magang tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah. Berperan dalam membantu menjalankan sebuah program dari pemerintah dengan tujuan yang mulia, yaitu mengatasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) bukanlah sebuah hal yang mudah, pasalnya dalam pelaksanaannya, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi. Terutama saat menghadapi masyarakat dengan tingkat

Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Ekstrim oleh Peserta MSIB Kampus Merdeka Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Prabu Mandvi Hafiz Anjar Suhendar, Yosafat Aji Pranata

Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, serta memiliki perbedaan latar belakang dan bahasa.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang memiliki pulau lebih banyak dari provinsi lain, terdapat 1.192 pulau dalam provinsi ini. Tentunya dari sekian banyak pulau tersebut, pemerintah terus berupaya melakukan perhitungan yang matang serta pembangunan yang merata agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di provinsi ini. Salah satu fokus pemerintah dalam pembangunan adalah pembangunan rumah tinggal. Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia Periode 2019-2024 menyampaikan sebuah instruksi bahwa Kementerian PUPR perlu mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, salah satunya dengan melalui perbaikan rumah. Sehingga, sejak 2021 hingga 2024 mendatang, pemerintah berupaya mencapai target, yaitu mengatasi kemiskinan ekstrim di 514 Kabupaten dan Kota agar persentase kemiskinan ekstrim mencapai di bawah 1%. Hasil dari instruksi tersebut, melalui Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, memilih untuk memfokuskan beberapa aspek melalui programnya, di antaranya adalah percepatan penurunan kemiskinan ekstrim melalui peningkatan kualitas RTLH, penanganan *stunting* dan penderita TBC, serta penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh terintegrasi.

Kata miskin memiliki arti bahwa miskin adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 1997). Sementara itu menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations* (UN) pada tahun 1996 menjelaskan bahwa Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (*United Nations*, 1996). Tingkat kemiskinan ekstrim dapat diukur menggunakan “*absolute poverty measure*”

yang konsisten antarnegara dan antar waktu. Kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki pengasihian di bawah US\$1.9 PPP (*Purchasing Power Parity*)/paritas daya beli, atau setara dengan Rp29.378 (30 Desember 2022). Lingkungan yang tidak sehat tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan manusia, terutama seorang anak. Masa balita merupakan sebuah periode yang sangat peka terhadap lingkungan sehingga diperlukan perhatian lebih terutama kecukupan gizinya. Salah satu yang menjadi prioritas pemberantasan oleh pemerintah adalah kondisi *stunting*, Dikutip dari laman web Kementerian Kesehatan, *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Diharapkan dengan adanya perbaikan lingkungan hidup, akan memperbaiki kesehatan dari penghuninya terutama generasi penerus bangsa.

Kota Kupang memiliki luas wilayah sebesar 180.3Km² atau sekitar 18.030 hektar. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di Kota Kupang (2020), kota ini memiliki 442.758.000 jiwa penduduk, dengan tingkat persentase kemiskinan sebesar 8.61% per tahun 2022. Tentunya angka 8.61% bukanlah angka yang baik, ditambah lagi dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) provinsi ini berjumlah Rp 1.950.00 yang sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan UMP Kota Jakarta sebesar Rp 4.641.854. Hal ini masih menjadi target pemerintah Kota Kupang untuk menangani kemiskinan ekstrim, ditambah lagi dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki tingkat kemiskinan provinsi ini sebanyak 20.05% dari 1.131.620 penduduk.

Tentunya hal-hal tersebut terkoneksi dan saling berhubungan, perlu adanya sebuah program dari pemerintah yang mampu membantu mengurangi masalah tersebut. Maka dari itu salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan ekstrim di Indonesia, pemerintah memberikan program-program

yang inovatif dan terintegrasi, salah satunya adalah Program BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Terdapat kata “stimulan” dan “swadaya” yang kurang umum bagi masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, stimulan adalah sesuatu yang menjadi cambuk bagi peningkatan prestasi atau semangat bekerja, atau pendorong dan perangsang. Untuk kata “swadaya” adalah kekuatan tenaga sendiri. Sehingga arti dalam garis bahasa yang ada bahwa program ini merupakan sebuah pendorong bagi masyarakat untuk dapat mengerjakan pembangunan rumah mereka dengan tenaga sendiri, uang sendiri, atau bantuan orang lain. Penyelenggaraan program ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak dasar rakyat di Indonesia untuk bertempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat.

Pemerintah membentuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan atau disingkat BP2P yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020. BP2P merupakan Unit Pelaksana Teknis Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan khususnya Direktorat Rumah Swadaya yang termasuk BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. BSPS memiliki sebuah tujuan yang terfokus dalam beberapa aspek, aspek-aspek. Hal ini merupakan sebuah poin penting yang perlu dituju dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, menjalankan instruksi Presiden, dan memenuhi tujuan-tujuan dalam pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yang ditentukan oleh *United Nations*. Dari ke tujuh belas tujuan, program ini terlihat berfokus menangani 3 tujuan, yaitu: (a) Tujuan 1, *No Poverty* atau Tanpa Kemiskinan, (b) Tujuan 2, *Good Health and Well Being* atau Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (c) *Clean Water and Sanitation* atau Air Bersih dan Sanitasi Layak.

Sebuah program tentunya memiliki dasar hukum agar memperlancar segala urusan dan tujuannya, Berdasarkan Petunjuk Teknis, Surat Edaran Nomor 3/SE/Dr/2021 Direktorat

Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan judul Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS sendiri memiliki 8 dasar hukum, salah satunya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403).

Dari dasar-dasar hukum tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah dana untuk kebutuhan program ini, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dana yang diberikan oleh pemerintah untuk satu penerima bantuan adalah sebesar Rp20.000.000, dengan rincian, Rp 17.500.000 untuk material dan biaya lainnya dan Rp 2.500.000 untuk upah tukang. Dana tersebut digunakan sebagai stimulan untuk warga dalam membangun dan memperbaiki kondisi rumah. Dana tersebut berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Terdapat dua metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian ini, yang pertama adalah metode penerapan program BSPS. Penerapan program ini perlu beberapa tahapan sesuai pada Petunjuk Teknis, Surat Edaran Nomor 3/SE/Dr/2021 Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan judul Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yaitu melakukan persiapan kegiatan seperti melakukan pengusulan lokasi, lalu melakukan verifikasi/penilaian usulan, penetapan lokasi, seleksi/pengolahan data, dan penyampaian daftar calon penerima bantuan, perencanaan kegiatan, penyiapan masyarakat, pelaksanaan kegiatan, dan pemanfaatan rumah atau penghunian dan pemeliharaan, dan pembinaan rumah penerima bantuan. Metode pelaksanaan yang kedua adalah, melakukan beberapa metode pelaporan lain seperti pengambilan dokumentasi, penyusunan bahan presentasi akhir, menyusun laporan mingguan, dan

Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Ekstrim oleh Peserta MSIB Kampus Merdeka Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Prabu Mandvi Hafiz Anjar Suhendar, Yosafat Aji Pranata

menyusun laporan akhir magang di Kampus Merdeka.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

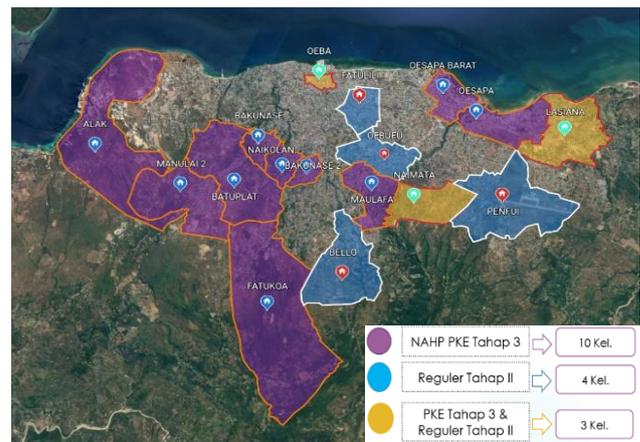
Dari hasil pemilihan penerima bantuan program BSPS pada tahun anggaran 2022, di Kota Kupang terdapat 87 penerima bantuan yang lolos dalam tahap verifikasi. 87 penerima bantuan tersebut tersebar di 17 kelurahan dari 51 kelurahan yang ada di Kota Kupang. Di dalam kota ini terdapat dua jenis sumber dana dari bantuan yang ada, yaitu Alokasi dana program Reguler dan program NAHP atau *National Affordable Housing Program*.

Tabel 1. Jumlah Penerima Bantuan BSPS di Kota Kupang, NTT, Indonesia (DJP, Kementerian PUPR, NTT, 2022)

Alokasi	Verifikasi	Eligible	SK PPK
NAHP PKE Tahap 3	650	136	66
Reguler Tahap II	21	21	21
Total			87

Kegiatan yang paling krusial dalam pengabdian kepada Masyarakat/magang ini adalah melakukan pengawasan, hal ini sangat penting dalam kegiatan konstruksi. Pengawasan pembangunan diperlukan untuk mengisi data pada laporan dan formulir yang tersedia. Pada kegiatan pengawasan terdapat beberapa hal yang ditemukan oleh peserta MSIB dan para pengawas lain/TFL, di antaranya yang paling sering adalah kesalahan dalam pembangunan konstruksi struktur rumah.

Menurut Siswono Yudohusodo (Rumah Untuk Seluruh Rakyat, 1991: 432), rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sebuah sarana pembinaan keluarga. Sehingga tanpa adanya tempat tinggal manusia akan mengalami kesulitan melakukan kegiatan, bertahan hidup, dan melanjutkan kegiatan kesehariannya. Sehingga kondisi sebuah rumah harus layak huni untuk pemiliknya.



Gambar 1. Peta Sebaran Penerima Bantuan BSPS per Kelurahan di Kota Kupang, NTT

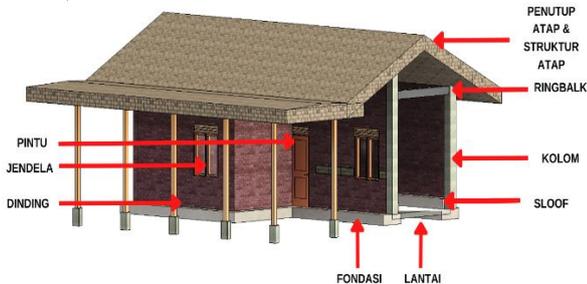


Gambar 2. Kegiatan Diskusi bersama Warga Penerima Bantuan BSPS dan Kegiatan Pengawasan Pembangunan

Hasil dari temuan di Kota Kupang, terdapat beberapa kondisi rumah penerima bantuan sudah sangat tidak layak untuk dihuni, terdapat temuan saat melakukan pengawasan bahwa banyak rumah yang hampir runtuh dikarenakan material rumah penerima bantuan sebelumnya sudah masuk kategori tidak layak pakai, data tersebut didapat saat melakukan penilaian kondisi rumah oleh pihak-pihak pemangku kebijakan. Diketahui bahwa mayoritas material dasar dari rumah tradisional penerima bantuan sebelum dilakukan perbaikan berasal dari kayu bebak gewang, kayu ini memiliki nama latin *Coryphan utan*, tanaman ini hanya akan berbuah dan berbunga sekali dimasa hidupnya. Pohon ini memiliki tinggi rata-rata sebesar 15-20 meter. Pohon palma ini hanya hidup di sekitar dataran rendah dan sekitar 300 mdpl. (Heyne, 1987 & Sastroadja, 1981).

Dalam kegiatan pengawasan, terdapat beberapa kesalahan-kesalahan struktural dan

non-struktural yang ditemukan, seperti kurangnya jumlah tulangan untuk komponen struktur hal ini dikarenakan tidak mengikuti anjuran standar penulangan kolom/ringbalk/sloof/balok yang tertera pada aturan SNI, PUPR maupun aturan Internasional seperti ACI 318 M-11 Pasal 10.9.2 yang menyatakan bahwa “menyatakan bahwa minimal harus dipasang empat buah tulangan memanjang untuk kolom dengan sengkang persegi atau lingkaran, minimal tiga buah untuk kolom berbentuk segitiga, serta minimal enam buah untuk kolom dengan sengkang spiral” (Badan Standardisasi Nasional, 2019). Terdapat juga temuan bahwa rumah penerima bantuan tidak memiliki ventilasi dan pintu pada bagian kamar, dapur, dan kamar mandi. Mengakibatkan bau yang tidak sedap di dalam rumah, hal ini melanggar aturan pada Petunjuk Teknis Program BSPS yang seharusnya adalah penghawaan suatu rumah diperlukan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai ruangan. (Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021)



Gambar 3. Komponen Struktural dan Non-Struktural Sebuah Rumah

Terdapat dua tipe perbaikan yang ditawarkan oleh pemerintah dan dapat dipilih oleh penerima bantuan untuk perbaikan rumah, yang pertama adalah metode konvensional dan yang kedua adalah metode perkuatan ferosemen.

Perlu diketahui bahwa pengerjaan dan penentuan komponen yang digunakan untuk membangun sebuah rumah yang benar harus sesuai dengan aturan yang ada. Seluruh rumah perlu memiliki komponen-komponen struktural maupun non-struktural yang tertera pada Gambar 2 dan memenuhi penilaian yang

ada. Penilaian ini berbasis pada beberapa Buku Aturan atau Standar Nasional Indonesia (SNI), di antaranya adalah menggunakan SNI 2847:2019 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung dan Penjelasan, SNI 1727:2020 tentang Beban Desain Minimum dan Kriteria Terkait untuk Bangunan Gedung dan Struktur lain, dan SNI itu adalah SNI 1726:2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-gedung. Bahan perkuatan menggunakan metode konvensional biasanya menggunakan komponen struktural seperti kolom beton bertulang, balok induk bertulang, dan ringbalk bertulang. Tulangan yang digunakan berjenis baja yang telah memiliki label SNI.



Gambar 4. Pelaksanaan Metode Ferosemen bersama Pihak Yayasan Adra

Untuk metode ferosemen sendiri memanfaatkan beberapa bahan yang berbeda dengan Metode Konvensional, bahan-bahan tersebut adalah: (1) Paku payung/paku seng, (2) Paku beton, (3) Ram kawat dengan $\pm \geq \emptyset 1\text{mm} - 2,5 \times 2,5\text{cm}$ dan lebar 100 cm, (4) kawat ikat/kawat bendrat, (5) Semen berlabel SNI, (6) Pasir bersih, (7) Botol kecap atau botol saus dengan moncong yang panjang, (8) gunting kawat, (9) ember, sendok semen, dan roskam, (10) Palu, (11) Bor atau alat pengganti bor. (Teddy Boen, 2015)

Tabel 2. Persentase Status Pembangunan Program BSPS di Kota Kupang, NTT, Indonesia (DJP, Kementerian PUPR, NTT, 2022)

Metode Perbaikan	Jumlah Rumah	Persentase Status Pembangunan
Konvensional	78	85-100%
Ferosemen	11	30-60%

Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Ekstrim oleh Peserta MSIB Kampus Merdeka Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Prabu Mandvi Hafiz Anjar Suhendar, Yosafat Aji Pranata

Setelah melakukan kegiatan dan rekapitulasi data selama beberapa bulan hingga Desember 2022, didapatkan hasil yang belum memuaskan. Hal ini dikarenakan masih terdapat setidaknya 11 dari 87 rumah yang belum selesai per 31 Desember 2022.

Dari hasil pengawasan, terdapat hasil di mana penerima bantuan yang menggunakan metode perbaikan dengan menggunakan metode ferosemen tidak sanggup selesai hingga 31 Desember 2022. Selama pembangunan menggunakan Metode Ferosemen, hal yang sering menjadi kendala adalah ketidakmauan pekerja bangunan untuk bekerja menggunakan metode tersebut. Ketidakmauan tersebut berasal dari rasa tidak mau belajar hal baru, tidak mengerti metode tersebut, dan ketidaksesuaian upah yang diberikan. Padahal, pihak Asisten Tenaga Fasilitator Lapangan hingga pihak Yayasan ADRA Indonesia sudah memberikan contoh cara pengerjaannya, namun tetap saja pekerja tidak mau melanjutkan pekerjaan.



Gambar 3. Kegiatan Pemasangan Peneng BSPS bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Daerah Kota Kupang

Masalah umum yang ditemukan dalam pengerjaan kedua metode ini adalah masalah biaya dan pekerja, dengan penghasilan penerima bantuan yang kurang lebih \leq UMR Kota Kupang, pembangunan dapat terhambat akibat kekurangan biaya. Kota ini tercatat oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada tahun 2021 pernah menyentuh suhu sebesar 35°C , tentunya cuaca yang panas sangat mempengaruhi kinerja pekerja terutama pada siang hari. Selain itu, dengan upah yang minimum, dengan total upah Rp.2.500.000, banyak pekerja yang tidak

mau menerima upah pekerjaan sebanyak itu, dampaknya banyak penerima bantuan yang bekerja sendiri dan memanfaatkan tenaga dari tetangga ataupun keluarga yang ada. Sering ditemukan bahwa penerima bantuan melakukan kegiatan yang cukup riskan, seperti menjual aset kekayaan yang dimiliki hingga melakukan peminjaman uang. Tentunya hal ini patut untuk menjadi perhatian bersama dan dapat diberikan solusi lain agar tidak menyusahkan penerima bantuan.

Kegiatan pengabdian lain selain melakukan pengawasan adalah melakukan Pengukuran komponen struktural dan non-struktural di lapangan, pengambilan dokumentasi, menggambar teknis menggunakan perangkat lunak *AutoCAD*, mendesain bangunan menggunakan perangkat lunak *Revit* dan *Lumion 9*, dan melakukan kegiatan pemasangan peneng BSPS.

D. PENUTUP

Simpulan

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk magang pada program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka Angkatan 3 di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur didapat beberapa kesimpulan, di antaranya adalah:

1. Program MSIB Kampus Merdeka yang merupakan regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 dan 18 memberikan kesempatan untuk pesertanya untuk menjadi lebih berkembang dalam kemampuan lunak (*softskills*) dan kemampuan keras (*hardskills*) serta mampu membuat peserta untuk beradaptasi menghadapi lingkungan baru seperti lingkungan perkantoran dan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat.
2. Kegiatan yang dilakukan peserta program MSIB Kampus Merdeka dengan membantu menerapkan Program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur bersama Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Nusa Tenggara Timur berjalan cukup efektif hal ini dibuktikan dengan rampungnya pembangunan & perbaikan 76 dari 87 rumah per 31 Desember 2022.

3. Terdapat 11 rumah yang menjalankan perbaikan menggunakan metode ferosemen terhambat selesai hingga 31 Desember 2022 atau akhir masa anggaran. Di antaranya adalah (1) Kurangnya rasa tanggung jawab penerima bantuan dalam pembangunan, (2) Tidak paham pengerjaan Pembangunan menggunakan metode baru dan sulitnya menerapkan metode baru (3) Pembangunan terhenti akibat penerima bantuan dan atau pekerja bangunan mabuk-mabukan hingga bersikap dan berkata kurang menyenangkan kepada Asisten TFL dan TFL.
4. Terdapat temuan kesalahan struktural yang tidak sesuai dengan SNI 2847:2019 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung dan Penjelasan, SNI 1727:2020 tentang Beban Desain Minimum dan Kriteria Terkait untuk Bangunan Gedung dan Struktur lain, dan SNI itu adalah SNI 1726:2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung, seperti pemasangan tulangan pokok memanjang yang kurang, pemasangan sengkang yang tidak kuat, dan pengecoran *sloof* yang tidak simetris. Hal ini menyimpulkan bahwa perlu adanya edukasi dasar mengenai pemasangan tulangan yang benar.
5. Terdapat temuan pada rumah lama dari penerima bantuan yang yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis, Surat Edaran Nomor 3/SE/Dr/2021 Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, seperti temuan sanitasi yang tidak layak dan sulit dijangkau, *septictank* yang tidak dibersihkan selamat 5 tahun, serta penghawaan yang kurang dari 5%. Hal ini membuktikan bahwa kondisi rumah lama

dari penerima bantuan tidak layak untuk dihuni dan perlu diperbaiki.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan dan jurnal ini tidak akan bisa ada jika tanpa pihak-pihak yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Diharapkan jurnal ini mampu untuk membantu calon peserta magang di program MSIB Kampus Merdeka ataupun pihak lain yang membutuhkan jurnal ini sebagai wawasan, panduan, dan ilmu pengetahuan. Dengan kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa berterima kasih kepada: (1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia dan pihak program Magang atau Studi Independen Bersertifikat Angkatan 3 Kampus Merdeka, (2) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nusa Tenggara Timur, (3) Beberapa pihak dari Yayasan ADRA Indonesia, (4) Koordinator dan seluruh Tenaga Fasilitator Lapangan Kota Kupang 2022, (5) Mentor di lokasi kegiatan MSIB Angkatan 3, (6) Seluruh dosen dan staff yang mendukung penulis di Universitas Kristen Maranatha, (7) Seluruh peserta magang program MSIB Kampus Merdeka Angkatan 3 di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nusa Tenggara

E. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional. (2019). *Persyaratan Beton Struktural untuk bangunan Gedung dan Penjelasan (ACI 318M-14 dan ACI 318RM-14, MOD) SNI 2847:2019*. Jakarta
- Badan Standardisasi Nasional. (2019). *Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung*. SNI 1726:2019. Jakarta
- Boen, T. (2015) *Membangun Rumah Tembokan Tahan Gempa dengan Balutan Lapisan Ferosemen*. Jakarta, Indonesia: CSI Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Surat Edaran Nomor*

**Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Ekstrim oleh Peserta MSIB
Kampus Merdeka Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur**

Prabu Mandvi Hafiz Anjar Suhendar, Yosafat Aji Pranata

- 3/SE/Dr./2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Jakarta. Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403)*. Jakarta
- Heyne, K. (1987). *Tumbuhan Berguna Indonesia*. Jakarta: Balitbang Kehutanan
- Kuncoro, Mudrajad. (1997). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Tallar, R.Y. (2022) *Pengantar Ilmu Lingkungan dalam Teknik Sipil*. Bandung: CV. Zahir Publishing
- Yudohusodo, Siswono. (1991), *Rumah untuk Seluruh Rakyat*. Indonesia: Barakerta